

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi Daerah Aliran Sungai: Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Community-based natural resource management in conservation efforts of the Watershed: Case study of Keseneng Village, Sumowono Subdistrict, Semarang District, Central Java

FRANSISCA EMILIA, BOEDI HENDRARTO, TUKIMAN TARUNA

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang 50275, Jawa Tengah.

Manuskrip diterima: 10 Mei 2013. Revisi disetujui: 4 Agustus 2013.

Abstract. *Emilia F, Hendrarto B, Taruna T. 2013. Community-based natural resource management in conservation efforts of the Watershed: Case study of Keseneng Village, Sumowono Subdistrict, Semarang District, Central Java. Bonorowo Wetlands 3: 73-100.* The implementation of the top-down model and centralized management are believed as the main reasons for the failure of watershed management (Daerah Aliran Sungai/DAS) in Indonesia. The failure has prompted the watershed management to the new paradigm in participatory natural resource management, namely community-based natural resources management (CBNRM) at the village level. This study aimed to evaluate the function/activities of governance and analyze several aspects of CBNRM in Keseneng village. The required data for this study consist of primary and secondary data. Primary data was collected through in-depth interviews with villagers, Semarang District, and an NGO (Komunitas Salunding). Data analysis was conducted using a qualitatively descriptive approach to function/activity management and several aspects of CBNRM. The results showed that the villagers' four management activities are excellent and participatory. At the same time, Semarang District-Local government and an NGO (Komunitas Salunding) work as facilitators in Watershed Management. The research results also show that the management also succeeds in the community-based aspects, consisting of five aspects: equity, empowerment, conflict resolution, knowledge and awareness, and biodiversity protection. Still, there is a failure in the aspect of sustainable utilization. Based on these results, the recommendations can be presented: the need for policymakers to support villagers' initiatives based on community natural resource management, the need to conduct a conceptual model CBNRM replication, and also Keseneng Village should work in partnership with neighboring villages to support the success of the six aspects of CBNRM.

Keywords: CBNRM, management, natural resources, watershed

PENDAHULUAN

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dilakukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dalam DAS dan manusia agar terwujud kelestarian ekosistem serta menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam tersebut bagi manusia. Jaminan keberlanjutan DAS dapat tercapai apabila setiap aktivitas pengelolaan dijalankan berdasarkan prinsip kelestarian yang memadukan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi. Adapun tujuan pengelolaan DAS sebagai berikut: (i) meningkatkan stabilitas tata air, (ii) meningkatkan stabilitas tanah, termasuk mengendalikan proses degradasi lahan, (iii) meningkatkan pendapatan petani, dan (iv) meningkatkan perilaku masyarakat ke arah kegiatan konservasi yang mengendalikan aliran permukaan dan banjir (Wulandari 2007).

Secara garis besar, sistem DAS dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Ekosistem DAS hulu sangat penting dalam sistem DAS sebab berfungsi sebagai perlindungan sistem tata air DAS secara keseluruhan. Soemarwoto (1982) menerangkan bahwa daerah hulu dicirikan sebagai ekosistem pedesaan dengan

empat komponen utama, yaitu: desa, sawah/ladang, sungai, dan hutan. Dengan demikian, pengelolaan DAS hulu bukan hanya untuk menjaga fungsi tata air DAS, melainkan juga harus mampu memperbaiki mata pencaharian dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan. Zoebisch et al (2005) menegaskan bahwa keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal dan kelestarian sumber daya alam, menjadi syarat tercapainya tujuan pengelolaan DAS yang berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, sedikitnya 30 % dari kawasan DAS seharusnya merupakan kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional. Daerah hulu yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kawasan di bawahnya dan daerah sempadan sungai seharusnya merupakan kawasan hutan (Keppres No. 32 Tahun 1990). Namun pada kenyataannya, di kawasan DAS di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, lahan di daerah hulu dan sempadan sungai sudah menjadi hak milik pribadi dan menjadi lahan pertanian.

Pengelolaan DAS di Indonesia belum mampu memenuhi tujuan pengelolaan DAS berkelanjutan. Dari tahun ke tahun jumlah DAS yang mengalami degradasi

lingkungan dan sumber daya alam semakin meningkat. Sanders (1992) mengungkapkan bahwa kerusakan dan degradasi lingkungan DAS terutama disebabkan oleh: (i) perencanaan dan praktek penggunaan lahan yang tidak sesuai, (ii) penambahan penduduk yang tinggi, (iii) kemiskinan dan kemerosotan ekonomi, (iv) kebijakan yang kurang mendukung, (v) kebijakan perlindungan dan peraturan tidak membatasi kepemilikan dan penggunaan lahan, serta (vi) ketidakpastian penggunaan hak atas tanah pada lahan hutan.

Degradasi DAS dipicu pengelolaan konvensional yang bersifat sektoral, tidak terpadu dari hulu ke hilir serta *top down* yang menekankan *command and control*, baik pada tataran kebijakan, operasional, maupun pelaksanaan (Nugroho 2003). Kegagalan pengelolaan DAS dengan pendekatan konvensional tersebut mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan baru yang menekankan keseimbangan sosial ekonomi dan lingkungan. Pergeseran paradigma tersebut mengedepankan pengelolaan DAS terpadu yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan DAS. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sudah memuat peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Namun, peran masyarakat yang diamanatkan dalam peraturan tersebut masih pada tahap memberikan masukan dan aspirasi, saran dan pertimbangan, serta mengawasi pengelolaan DAS. Masyarakat belum dipandang sebagai subjek yang mampu mengelola sumber daya alam untuk mendukung pengelolaan DAS berkelanjutan dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau *community based natural resources management* (CBNRM). Pendekatan ini mulai berkembang sejak akhir 1990-an seiring bergulirnya era desentralisasi dan demokrasi. Keberhasilan pendekatan CBNRM dalam mendukung pengelolaan pada skala yang lebih besar membutuhkan beberapa prasyarat seperti didukung legalitas yang kuat, organisasi yang sudah berkembang, dan pendanaan yang mendukung infrastruktur (Keller et al. 2000). Prasyarat tersebut ditegaskan lebih rinci oleh Armitage (2005) bahwa keberhasilan CBNRM dipengaruhi oleh faktor eksogenus dan indigenus yaitu: (i) fokus terhadap tujuan dan arah CBNRM; (ii) kompetensi, keahlian, dan kapasitas teknis lainnya pada pelaksana dan partisipan CBNRM, terutama organisasi pelaksana; dan (iii) pendirian dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap CBNRM. Pelaksanaan CBNRM tanpa terpenuhinya prasyarat-prasyarat tersebut umumnya hanya berhasil pada aspek sosial dan ekonomi (Keller et al. 2000) atau bahkan gagal sama sekali (Isyaku 2011). Kegagalan tersebut justru menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Salah satu DAS yang mengalami degradasi lingkungan adalah DAS Bodri yang terletak di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK.328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, DAS tersebut merupakan salah satu DAS

prioritas; yakni: DAS mengalami kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga menjadi prioritas kegiatan perbaikan kualitas DAS. Perbaikan tersebut meliputi manajemen serta rehabilitasi hutan dan lahan. Daerah aliran sungai seluas 94.028,013 ha ini terbagi atas lima sub DAS. Berdasar pengamatan citra satelit, diketahui telah terjadi perubahan tata guna lahan di daerah hulu DAS Bodri. Kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan, sudah berubah menjadi daerah pertanian dan permukiman. Dari laporan BPDAS Pemali Jratun diketahui bahwa erosi yang terjadi di wilayah DAS Bodri mencapai 4.870.185,96 ton/tahun. Kerusakan lahan di daerah hulu juga mengakibatkan banjir di Kabupaten Kendal yang merupakan DAS bagian tengah dan hilir (BPDAS Pemali Jratun 2010).

Perubahan tata guna lahan di daerah hulu DAS Bodri dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk, sementara jumlah lahan terbatas. Di lain sisi, penduduk yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, tidak memiliki keterampilan lain dan kesempatan untuk bekerja pada sektor lain. Tekanan terhadap lahan semakin lama semakin besar, kepemilikan lahan semakin sempit, dan pendapatan petani semakin kecil. Untuk meningkatkan pendapatan, penduduk memperluas lahan pertanian dengan merambah hutan di lahan-lahan yang tidak layak sebagai lahan pertanian karena secara topografi sangat curam. Tekanan penduduk pada wilayah DAS Bodri sudah mencapai angka 1,70-3,61 (BPDAS Pemali Jratun 2010).

Kondisi tersebut akan semakin parah apabila tidak ada upaya-upaya untuk menyelamatkan daerah hulu. Upaya yang dilakukan sebaiknya bukan hanya domain pemerintah, melainkan melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya. Salah satu inisiatif penyelamatan DAS skala mikro sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Keseneng melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau CBNRM.

Desa Keseneng merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah hulu DAS Bodri, tepatnya pada sub DAS Blorong di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Sejak 2010, desa ini berupaya mengelola sumber daya alam berbasis masyarakat dengan fokus desa wisata. Mereka memanfaatkan potensi sumber daya alam dan menempatkan Curug Tujuh Bidadari sebagai produk utama.

Tujuan penelitian ini adalah (i) Mengetahui aktivitas/fungsi pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dan peranan pihak luar dalam pengelolaan tersebut. (ii) Menganalisis aspek-aspek pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di desa tersebut. (iii) Menggambarkan model konseptual CBNRM di desa tersebut dan (iv) Menyusun model implementasi CBNRM dalam mendukung konservasi DAS.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa

tersebut merupakan salah satu desa yang terletak di hulu DAS Bodri yang wilayahnya meliputi empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Desa tersebut dipilih karena berlokasi di DAS Bodri hulu yang merupakan salah satu DAS prioritas. Pada sisi lain desa tersebut mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dengan fokus pariwisata. Peta lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. Adapun penelitian ini dilakukan selama enam bulan mulai bulan Mei sampai bulan Oktober 2012.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data sekunder sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil penelitian.

Data primer dikumpulkan dari masyarakat Desa Keseneng yang terlibat atau mengetahui pengelolaan sumber daya alam serta pihak luar yang terkait, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan LSM Komunitas Salunding sebagai pendamping.

Data sekunder pada penelitian ini berupa data yang menyangkut dokumen terkait dengan kelembagaan, desa, kecamatan, kabupaten, organisasi pengelolaan desa wisata,

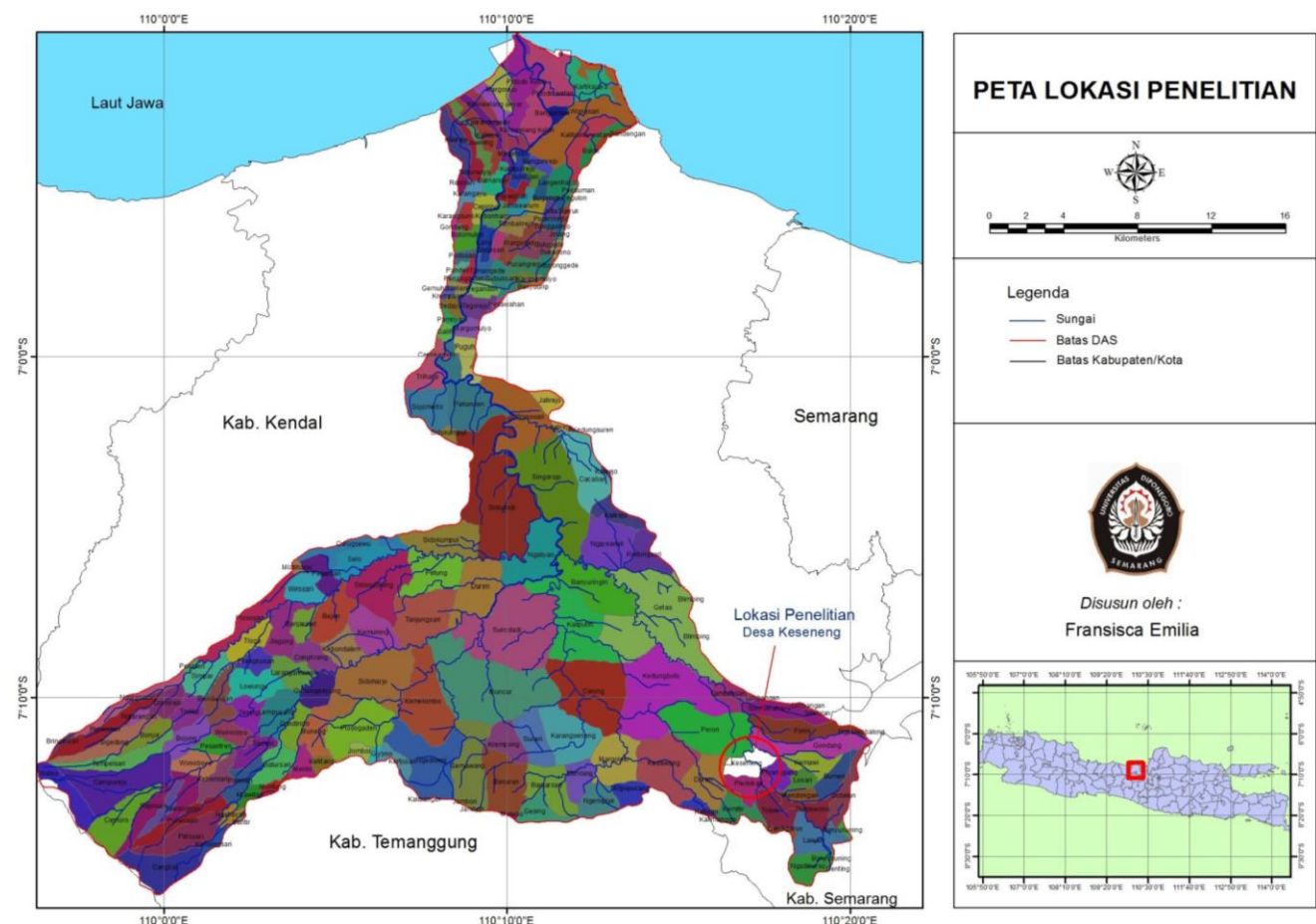
peta lokasi, peta DAS, monografi desa, dan profil desa. Data tersebut dikumpulkan melalui perpustakaan, internet, kantor Desa Keseneng, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dan BPDAS Pemali Jratun. Keterangan jenis dan sumber data penelitian ditunjukkan pada Tabel 1.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam.

Studi literatur

Sebelum mengumpulkan data di lapangan, peneliti melakukan studi literatur untuk memperoleh gambaran umum desa berupa peta administratif, peta DAS Bodri, dan kondisi geografis maupun potensi desa. Studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait pengelolaan sumber daya alam berupa peraturan-peraturan maupun kebijakan. Studi literatur untuk memperoleh data data tersebut dilakukan dengan penelusuran pustaka, pencarian melalui internet dan mendatangi instansi yang memiliki data terkait.



Gambar 1. Lokasi penelitian di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Tabel 1. Jenis dan sumber data penelitian

Fenomena	Data yang dibutuhkan	Metode	Jenis data	Sumber data
Kondisi umum	Kondisi geografis Tata guna lahan Potensi SDA Potensi SDM	Studi literatur, observasi	Primer Sekunder	Desa, BPDAS Pemali Jratun, dokumen desa
Perencanaan	Kapan Bagaimana Siapa saja Tahapan	Wawancara, studi literatur,	Primer, sekunder	Narasumber, dokumen desa
Pengorganisasian	Kepemimpinan Bentuk organisasi Cara pengorganisasian	Wawancara, observasi, studi literatur	Primer, sekunder	Narasumber, desa, dokumen desa
Pelaksanaan	Bagaimana Pembiayaan Pendapatan Manfaat sosial, ekonomi, lingkungan	Wawancara, observasi	Primer	Narasumber, desa
Pengendalian	Mekanisme Siapa	Wawancara	Primer	Narasumber
Peran pihak luar	Siapa Bagaimana	Wawancara	Primer	Narasumber
Keadilan	Penerima manfaat Bagi hasil	Wawancara, observasi	Primer	Narasumber, desa
Pemberdayaan	Pendelegasian wewenang Pendampingan Pelatihan	Wawancara	Primer	Narasumber
Resolusi konflik	Konflik apa saja mekanisme	Wawancara	Primer	Narasumber
Pengetahuan dan kesadaran	kearifan lokal pengetahuan ekologi	Wawancara	Primer	Narasumber
Perlindungan keanekaragaman hayati	Apa saja Bagaimana	Wawancara, observasi	Primer	Narasumber, desa
Pemanfaatan berkelanjutan	Bagaimana	Wawancara	Primer	Narasumber

Observasi

Peneliti melakukan observasi untuk berkenalan dengan warga Desa Keseneng. Dalam observasi peneliti berusaha untuk dapat diterima dan menjadi bagian dari warga desa sehingga tidak ada kecurigaan warga terhadap kehadiran peneliti. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan lapangan secara langsung untuk mengetahui potensi sumber daya alam dan tata guna lahan Desa Keseneng. Pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hasil pengamatan didokumentasikan dengan kamera.

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara detail mengenai pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng. Penggalan informasi dari narasumber dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi sebanyak mungkin dari narasumber dalam suasana santai dan rileks. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan bahasa sehari-hari yang sederhana dan mudah dimengerti dengan tetap mengacu panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui obrolan santai yang dilakukan di rumah narasumber

maupun di lokasi narasumber beraktifitas, narasumber menjadi lebih terbuka dalam menceritakan pengalamannya.

Pemilihan narasumber yang diwawancarai menggunakan teknik *purposive* (bertujuan) dan *snowball* (bola salju). Peneliti mewawancarai kepala desa sebagai *keyperson* (narasumber kunci), kemudian kepala desa menginformasikan narasumber berikutnya yang memahami permasalahan, yaitu ketua organisasi pengelola. Selanjutnya, narasumber kedua tersebut juga menunjukkan narasumber-narasumber lain yang memahami permasalahan. Demikian seterusnya sampai tidak ada informasi baru yang diperoleh.

Jumlah narasumber penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri atas perangkat desa, pengurus organisasi pengelola, pekerja harian, masyarakat pemilik lahan terkena zonasi, pedagang, pamong budaya Disporabudpar Kabupaten Semarang, dan aktivis LSM Komunitas Salunding. Keterangan lengkap tentang narasumber tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Secara garis besar analisis dibagi dalam tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1992). Analisis data dilakukan secara terus-menerus mulai saat penyusunan konseptual penelitian, saat pengumpulan data di lapangan dan sesudahnya.

Dalam penelitian ini dikumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait sumber daya alam dan pengelolaannya di Desa Keseneng. Selanjutnya dalam tahap reduksi data dipilah-pilah sesuai aspek yang diteliti, dan data yang tidak perlu dibuang. Selanjutnya, data yang telah dipilah-pilah tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif, bagan, tabel, matrik, dan sebagainya. Kemudian pada tahap verifikasi, data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Tabel 2. Identitas narasumber

Nama	Usia (tahun)	Keterangan
Maskuri	33	Kepala desa, penasehat organisasi pengelola Curug Tujuh Bidadari
Nur Kholimah	27	Pedagang, pernah menjadi pengurus organisasi sebagai penjaga loket
Rohadi	55	Perawat tanaman, petugas kebersihan
Ngadi Dul Wahab	61	Juru kunci Kedung Wali
Amin Sobirin	51	Kepala Dusun Keseseh
Margianto	24	Petugas SAR
Mursalim	32	Sekretaris organisasi pengelola, tokoh pemuda
Sri Umiyati	47	Pedagang
Mbah Sabar	-	Pengurus organisasi, mantan kepala desa, pemilik lahan terkena zonasi
Basuki	-	Ketua organisasi, kepala dusuni
Tri Subekso	-	Pamong budaya Disporabudpar Kabupaten Semarang, anggota tim pendamping CBNRM
Mohamad Annas	35	Aktivis LSM Komunitas Salunding

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan aktivitas-aktivitas atau fungsi pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) serta peran pihak luar dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis aspek-aspek *community based* dalam pengelolaan sumber daya alam, meliputi: *equity* (keadilan), *empowerment* (pemberdayaan), *conflict resolution* (resolusi konflik), *knowledge and awarrenes* (pengetahuan dan kesadaran), *biodiversity protection* (perlindungan keanekaragaman hayati), dan *sustainable utilization* (pemanfaatan berkelanjutan). Setelah menganalisis aktivitas-aktivitas atau fungsi pengelolaan dan aspek *community based*, selanjutnya digambarkan model konseptual CBNRM di Desa Keseneng dan disusun model CBNRM dalam mendukung upaya konservasi DAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Keseneng yang merupakan salah satu desa yang terletak pada DAS Bodri hulu, tepatnya Sub-DAS Blorong. Desa yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang ini telah melakukan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dengan fokus Desa Wisata.

DAS Bodri

DAS Bodri merupakan salah satu DAS di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk DAS Prioritas Nasional dalam RPJM 2010-2014. Secara Geografis, DAS Bodri terletak pada 7° 23' 00" - 7° 54' 8" LS dan 109° 52' 01" - 110° 08' 06". Wilayah seluas 94.028,013 ha tersebut dibagi dalam lima sub DAS, yaitu Sub DAS Lutut (18.913,973 ha), Sub DAS Logung (8.629,016 ha), Sub DAS Blorong (25.958,865 ha), Sub DAS Putih (11.900,655 ha), dan Sub DAS Bodri hilir (28.625,504 ha) (BPDAS Pemali Jratun 2006).

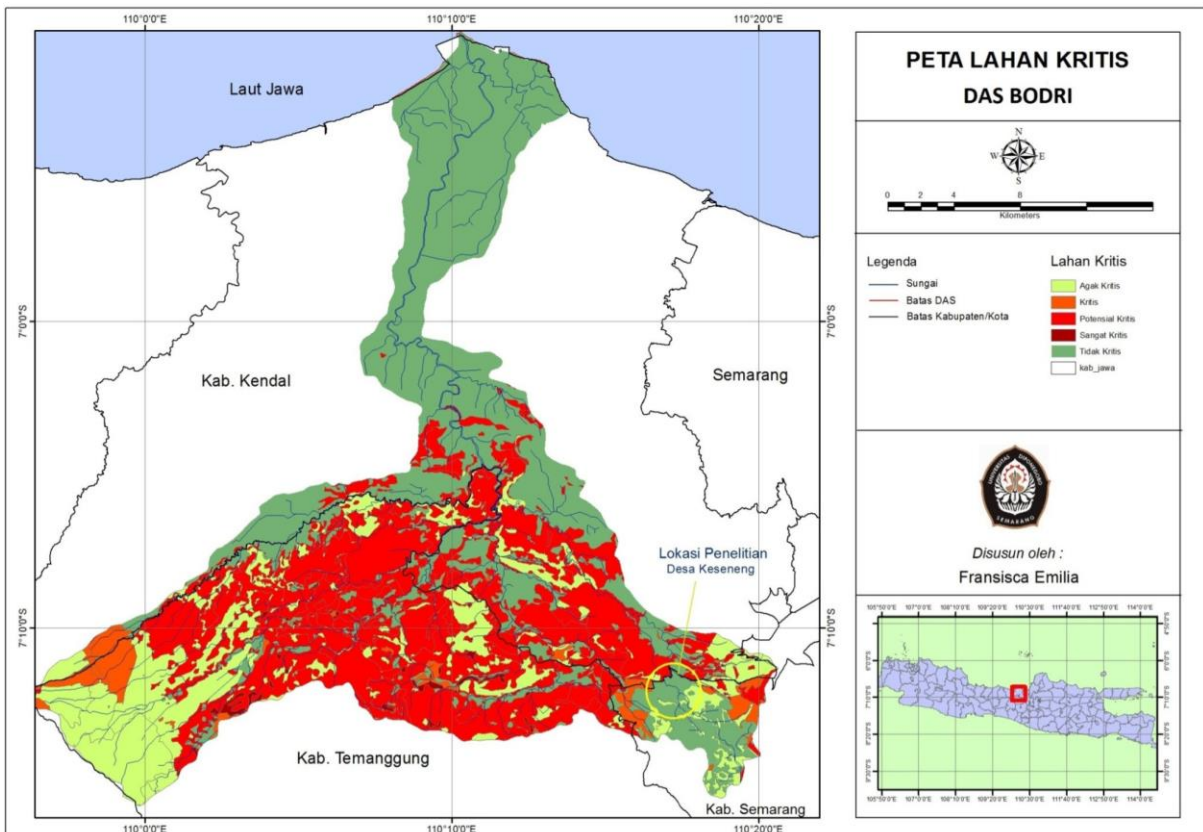
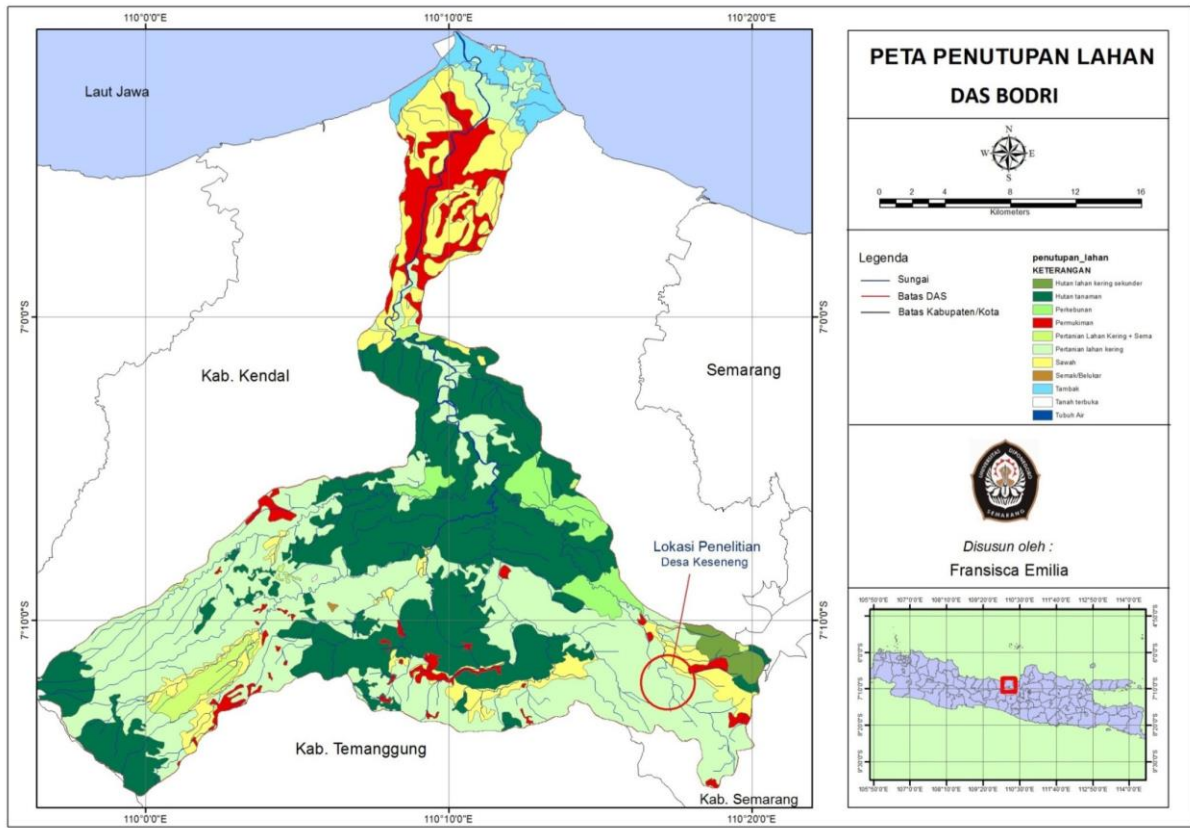
Secara administratif DAS Bodri meliputi empat Kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang. Wilayah Kabupaten Temanggung terdiri atas 7 kecamatan dan 19 desa, Kabupaten Kendal 17 kecamatan dan 186 desa, Kabupaten Semarang 1 kecamatan dan 3 desa, serta Kota Semarang 1 kecamatan 4 desa (BPDAS Pemali Jratun 2006).

Kondisi topografi wilayah DAS Bodri beragam mulai dari datar, berombak, bergelombang, berbukit hingga bergunung. Dengan kondisi topografi seperti itu, penggunaan lahan pun cukup beragam, yaitu berupa kawasan hutan, tegalan, kebun campur, perkebunan, permukiman, sawah, rawa, dan kebun rakyat. Penggunaan lahan terbesar adalah tegalan seluas 26.578,931 ha atau 28,27 % dari keseluruhan luas DAS. Adapun hutan seluas 20.069,931 ha atau 21,43% (BPDAS Pemali Jratun. 2006)(Gambar 2).

Daerah aliran sungai yang melintasi empat kabupaten dan kota ini memiliki curah hujan rata rata sebesar 2.553 mm/tahun. Nilai KRS (Koefisien Regim Sungai) yang merupakan perbandingan antara debit maksimum dan minimum sungai sebesar 143 (>120) yang artinya masuk dalam klasifikasi jelek. Nilai IPA (Indek Penggunaan Air) yang merupakan rasio antara persediaan dan penggunaan air rata-rata sebesar 1,99 di bawah nilai ideal sebesar 3.

Desa Keseneng

Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang termasuk bagian dari DAS Bodri, tepatnya di Sub-DAS Blorong. Secara geografis, Keseneng merupakan desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten mencapai 48 km, sementara dari Kota Semarang (provinsi) hingga 58 km. Pusat pemerintahan yang terdekat adalah Kantor Kecamatan Sumowono, yakni 6,5 km.



Gambar 2. Peta penutupan lahan DAS Bodri (atas) dan peta lahan kritis DAS Bodri (bawah)

Tabel 3. Tata guna lahan Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Jenis lahan	Luas dalam hektare (Ha)
Sawah irigasi teknis	36
Sawah irigasi sederhana	25
Tadah hujan	11
Pekarangan dan bangunan	19
Tegalan/Hutan rakyat	173,252
Luas Keseluruhan	228,252

Sumber: RPJMDes Keseneng 2010-2015

Desa Keseneng merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Sebelah utara desa tersebut adalah Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Begitu juga dengan sebelah barat desa, yakni berbatasan dengan Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Sementara itu, sebelah selatan Keseneng adalah Desa Pledokan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dan sebelah timur Desa Piyanggang juga di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kondisi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, membuat Desa Keseneng yang terdiri atas tiga dusun, yakni Keseneng, Tlawah, dan Keseseh menjadi kurang dalam sarana dan prasarana umum, baik bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemasaran atau pusat ekonomi. Kondisi tersebut terungkap dalam wawancara dengan Mbah Sabar:

“Dulu orang tua enggan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMP dan SMA karena letaknya jauh dan sarana transportasi minim. Selain itu, pendapatan warga juga pas-pasan..” (kom. pri 2012)

Desa memiliki luas wilayah 228,252 ha, yang terdiri atas sawah dengan irigasi teknis, sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, lahan kering/tegalan, dan permukiman. Lahan kering yang terbagi dalam tegalan dan hutan rakyat, merupakan lahan paling luas di Desa Keseneng, yakni mencapai 173,252 ha. Keseluruhan lahan yang ada di Desa keseneng merupakan milik warga dan pemerintahan desa. Komposisi tata guna lahan ditunjukkan pada Tabel 3 dan peta pada Gambar 3.

Keseneng merupakan desa di daerah pegunungan, dengan tinggi dari permukaan air laut mencapai 700 meter. Kondisi iklim Keseneng sebagaimana desa pegunungan di Jawa, memiliki curah hujan cukup tinggi hingga 2.300 mm/tahun, dengan suhu rata-rata cukup sejuk, yakni 27-30 derajat celcius.

Kondisi topografi desa berbukit-bukit dengan banyak lembah, mata air, sungai, dan hutan. Kawasan perbukitan tersebut oleh masyarakat setempat disebut gunung. Sebagai contoh Gunung Tugel di Dusun Keseneng dan Gunung Getas di Dusun Tlawah. Kondisi perbukitan tersebut sangat menarik atau memiliki panorama alam yang indah. Perbukitan di Keseneng, dapat digunakan untuk lintas alam karena memiliki jalur-jalur alternatif yang menyajikan panorama alam yang menarik. Para pendaki dapat menyaksikan matahari terbit dari puncak perbukitan serta melihat pemandangan laut Kota Semarang dan Kendal, terutama dari puncak Bukit Getas.

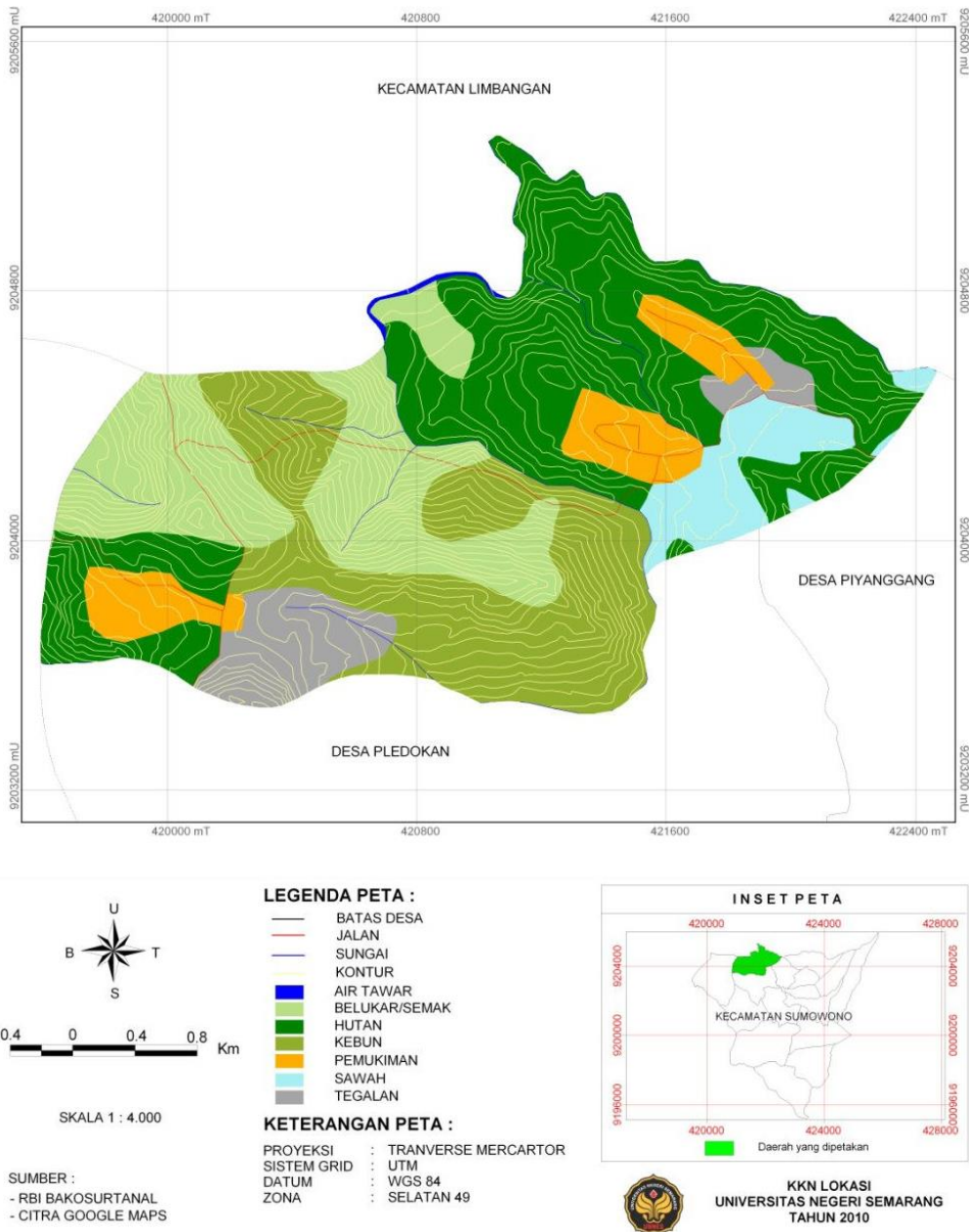
Perbukitan di Desa Keseneng juga kaya akan deposit bebatuan. Ada dua kawasan yang memiliki deposit tinggi, yaitu Bukit Watu Bantal di Dusun Keseseh dan Watu Kenong di Dusun Keseneng. Batu-batu besar sebagai sumber kekayaan alam desa juga tersebar di aliran-aliran sungai. Batu-batu tersebut digunakan warga sebagai salah satu modal pembangunan desa, seperti membuat rumah, jalan, serta sarana dan prasarana umum.

Sebagai bagian dari DAS Bodri, Sub DAS Blorong, Desa Keseneng memiliki banyak sungai yang tersebar di tiga dusun. Dusun Tlawah mempunyai dua sungai, yaitu Sungai Mandingan dan Sungai Wetan. Tiga sungai lainnya berada di Dusun Keseneng, yaitu Sungai Ringin, Sungai Doh, dan Sungai Banteng. Satu sungai lagi berada di Dusun Keseseh, yaitu Sungai Gongso. Dari keenam sungai ini, hanya Sungai Ringin yang dimanfaatkan untuk irigasi. Selain sungai, juga terdapat sembilan air terjun dengan karakter yang berbeda-beda di dua dusun. Dua air terjun di Dusun Keseseh, yaitu Air Terjun Paleburgongso dan Air Terjun Setro. Tujuh air terjun di Dusun Keseneng, yaitu Air Terjun Tujuh Bidadari, Kerincing, Kali Doh, Tampok/Bakoan, Precet, Kedungmuning, dan Getas. Dari banyak air terjun tersebut, hanya satu yang telah dikelola untuk atraksi wisata, yaitu Curug Tujuh Bidadari. Satu air terjun dalam proses penataan untuk dibuka bagi kepentingan wisata desa, yakni Curug Paleburgongso.

Meskipun memiliki banyak sungai dan perbukitan, Desa Keseneng minim mata air yang dapat digunakan untuk menopang kebutuhan warga sehari-hari. Mata air-mata air itu berada di bawah permukiman, dan debitnya tidak mencukupi untuk kebutuhan warga. Ada empat mata air di Desa Keseneng, tiga di antaranya ada di Dusun Keseneng, yaitu Kedung Wali, Sendang Tuk, dan Sendang Boto. Satu mata air lainnya berada di Dusun Keseseh, yaitu Sendang Kendi. Kini pemanfaatan mata air masih sebatas untuk cadangan air bersih. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, warga telah membuat sistem instalasi air bersih hingga ke rumah-rumah melalui program Pamsimas. Namun sumber yang digunakan justru dari luar desa yang posisinya lebih tinggi secara geografis. Sumber-sumber tersebut antara lain dari daerah Trayu, Kemawi, Getas, Mentor, dan Ngaglik.

Pada Gambar 4 ditunjukkan dua sumber daya alam yang sudah dikelola sebagai objek wisata, yaitu Curug Tujuh Bidadari dan Mata Air Kedung Wali yang berada di atas curug. Curug Tujuh Bidadari merupakan air terjun yang berada di Kali Ringin dan terdiri dari tujuh air terjun yang berdekatan. Mata Air Kedung Wali yang dipercaya sebagai air bertuah berada tidak jauh dari air terjun paling atas. Mata air tersebut muncul pada sebuah batu berlubang yang membentuk sumur kecil berdiameter sekitar 1 m.

Sumber daya alam lain yang juga dimiliki Keseneng adalah hutan rakyat yang menutupi kawasan perbukitan. Tanaman-tanaman penyusunnya terdiri atas aren, sengon, jabon, kopi, kelapa, bambu, dan albasia. Hutan rakyat tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem Desa Keseneng. Di dalamnya masih terdapat banyak satwa unik dan khas seperti macan tutul, kijang, monyet, ikan sili tilam merah, ikan sili tilam totol, dan elang.

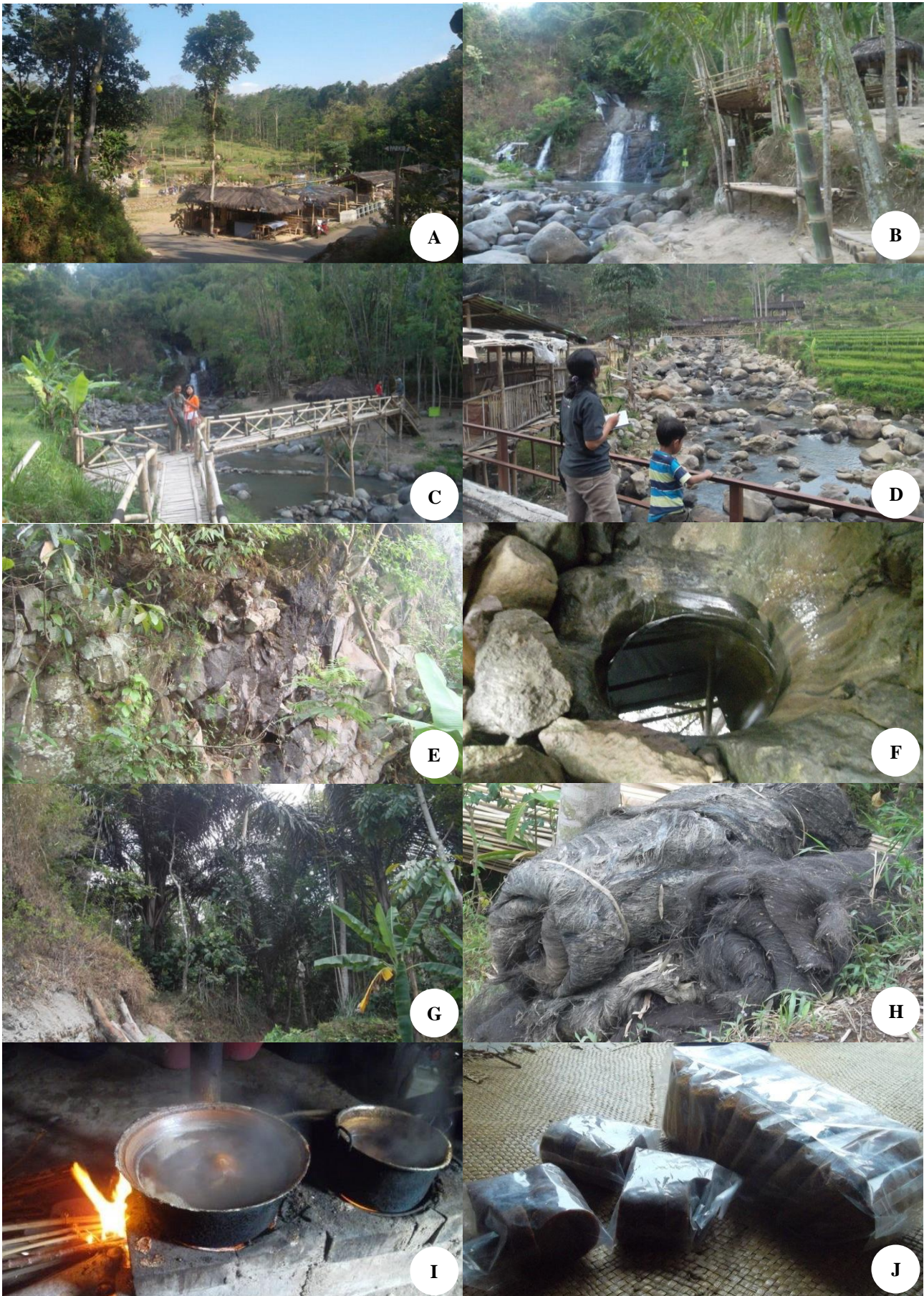


Gambar 3. Peta tata guna lahan Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

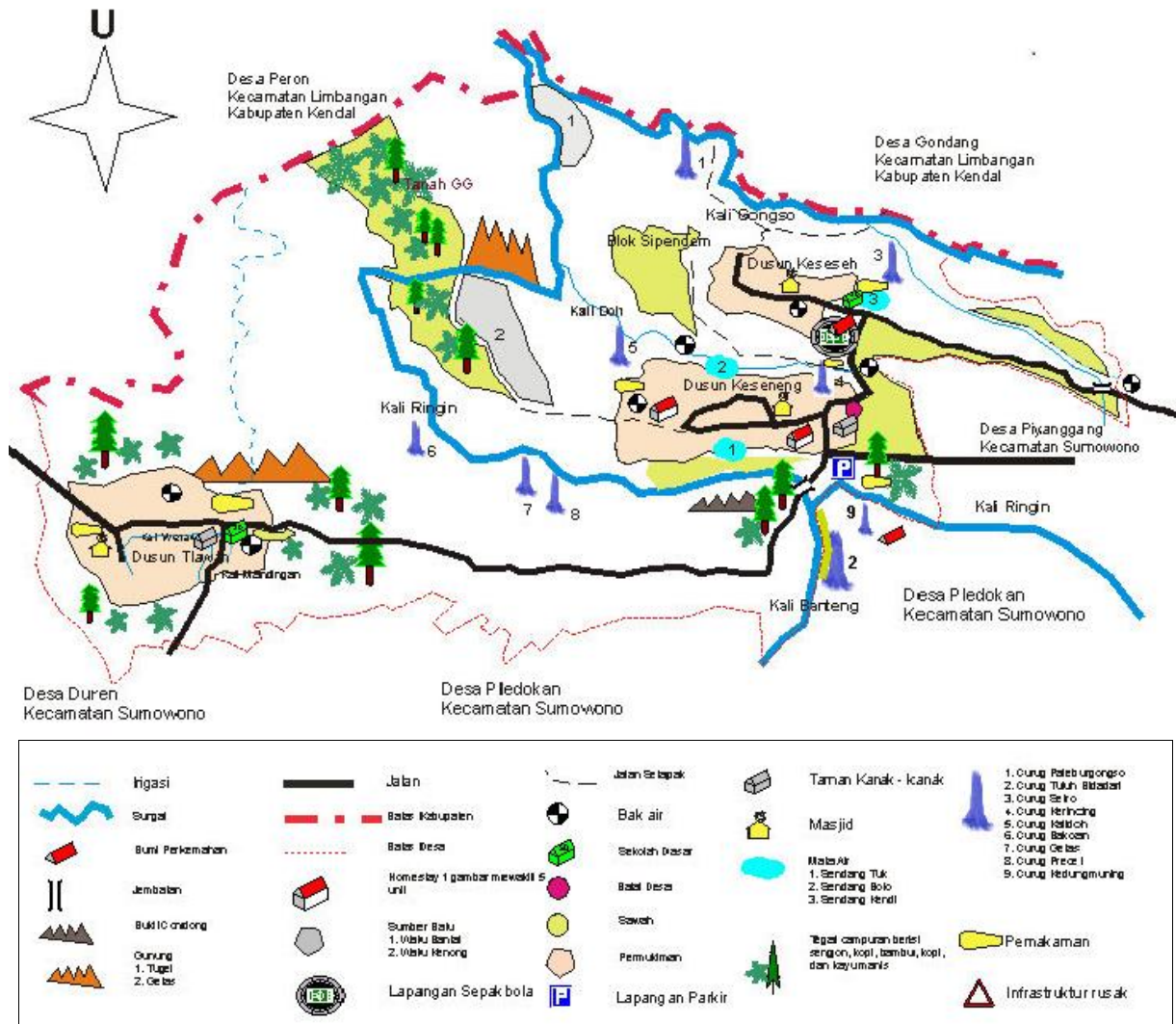
Selain satwa, ada berbagai jenis rempah-rempah yang dapat dijadikan sumber perekonomian warga, yaitu cengkih, lada hitam, jahe, kayu manis, dan kapulogo. Sementara untuk tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Desa Keseneng, adalah kopi, jengkol, kakao, petai, bambu, aren, ketela pohon, ubi jalar, dan kelapa.

Kekayaan sumber daya alam Desa Keseneng tersebut sudah dipetakan secara detail seperti pada Gambar 5. Masyarakat memetakan kekayaan alam yang dimiliki sebagai bahan perencanaan pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya peta tersebut, rencana pengelolaan dan pembangunan dapat dilakukan pada lokasi yang paling tepat.

Desa dengan sumber daya alam yang melimpah tersebut didiami oleh 381 keluarga dengan jumlah penduduk 1.522 jiwa, yang terdiri atas 649 laki-laki dan 873 perempuan. Tingkat pendidikan warga Desa Keseneng masih rendah, sebagian besar warga hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD). Meskipun ada beberapa orang yang sudah menempuh pendidikan sampai tingkat SLTA dan perguruan tinggi, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Sebagian besar dari warga yang memiliki pendidikan lebih baik tersebut, juga enggan untuk tinggal di desa. Lulusan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi tersebut lebih suka bekerja di kota. Dari 1.522 jiwa, jumlah lulusan perguruan tinggi hanya 13 orang dan lulusan SMA 82 orang (Tabel 4).



Gambar 4. Sumber daya alam Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. A. Pintu masuk Curug Tujuh Bidadari, B. Curug Tujuh Bidadari, C-D. Kali Bodri, E. Potensi Galian C (batu), F. Mata Air Kedung Wali, G. Potensi tumbuhan aren, H. Ijuk aren, I. Pengolahan gula aren, J. Gula aren



Gambar 5. Sumber daya alam di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (RPJMDes Desa Keseneng 2011-2015)

Kondisi lingkungan alam dan tingkat pendidikan sangat memengaruhi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari 381 keluarga, hampir 70% di antaranya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hanya sebagian kecil warga yang bekerja di sektor lain, baik bidang jasa, swasta, maupun pegawai negeri sipil/TNI. Mereka bekerja sebagai pedagang, jasa transportasi, buruh bangunan, pekerja pabrik atau merantau keluar kota untuk menjadi sales/pekerjaan lainnya.

“Anak-anak muda lebih memilih kerja di luar desa, seperti jadi sales hingga Sumatra, kerja di proyek galian kabel, atau jadi karyawan pabrik. Petani sudah mulai ditinggalkan...” (Maskuri, kom.pri. 2012)

Sebagian kecil warga yang menetap ada yang memilih pekerjaan lain seperti pedagang, membuka usaha, atau bekerja di sektor transportasi desa. Usaha dagang yang

ditekuni berupa jual beli hasil bumi atau membuka warung kelontong untuk pemenuhan kebutuhan hidup warga sehari-hari. Profesi yang masih sangat dibutuhkan dan hingga kini belum terpenuhi adalah guru. Ketiga dusun di Desa Keseneng, yakni Keseneng, Keseseh, dan Tlawah masih kekurangan tenaga pengajar untuk menunjang perkembangan pendidikan (Tabel 5).

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan juga terbatas. Rata-rata, warga yang menetap memilih sektor pertanian, dengan pola dan pengetahuan yang terbatas. Mereka menanam komoditas pertanian yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti padi dan jagung. Tanaman pangan dianggap lebih menguntungkan karena bisa dikonsumsi, dan tanaman lain belum banyak ditanam karena minimnya informasi dan pengetahuan warga.

Tabel 4. Penduduk berdasarkan pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tamat Akademik/Perguruan Tinggi	13
2	Tamat SLTA	82
3	Tamat SLTP	142
4	Tamat SD	523
5	Belum tamat SD	186
6	Tidak Sekolah	74
7	Belum Sekolah	502
Jumlah		1.522

Sumber: Monografi Desa Keseneng 2010

Tabel 5. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tingkat pendidikan	Jumlah dalam jiwa
Petani	387
Buruh tani	209
Buruh pabrik	9
Pengusaha	3
Buruh bangunan	67
Transportasi	6
PNS/TNI	6
Pensiunan	1
Pedagang	9
Lain-lain	139
Jumlah	838

Sumber: RPJMDes 2010-2015

Tabel 6. Keluarga miskin Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Dusun	Keluarga miskin	Jumlah keluarga
Keseneng	145	169
Keseseh	47	56
Tlawah	141	156
Jumlah	333	381

Sumber: RPJMDes Keseneng 2010-2015

Kelemahan lain dari komoditas pertanian adalah ketergantungan warga pada tengkulak dalam hal pemasaran. Untuk memasarkan langsung ke pusat-pusat penjualan, warga merugi karena terbebani biaya transportasi yang tidak murah. Ketergantungan terhadap tengkulak tersebut berujung pada harga komoditas pertanian desa hanya dapat dijual murah, dibawah harga pasaran pada umumnya. Selisih harga yang sangat besar antara tengkulak dan pedagang besar pengepul, membuat petani selalu dirugikan. Alur panjang pemasaran komoditas pertanian tersebut ditunjukkan pada Gambar 6. Pada gambar tersebut terlihat bahwa komoditas pertanian dari Desa Keseneng harus melalui rantai pedagang yang panjang sebelum sampai ke pasar yang menjual komoditas tersebut kepada konsumen. Akibatnya, harga jual di tingkat petani sangat rendah dibandingkan harga jual di pasar.

Kondisi tersebut diperparah dengan kepemilikan lahan yang tidak merata. Beberapa warga memiliki lahan yang sangat luas, sementara sebagian besar hanya memiliki lahan sempit yang diwariskan secara turun temurun. Pendapatan dari hasil pertanian di lahan yang sempit tersebut tidak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup

untuk konsumsi sendiri. Akibatnya, hasil pertanian tidak dapat membuat warga sejahtera.

Sementara itu, lahan yang paling luas berupa hutan rakyat dengan keanekaragaman potensi, belum dimanfaatkan secara maksimal. Tanaman keras yang tumbuh di hutan rakyat tersebut umumnya merupakan tanaman yang tumbuh secara alami, tidak dibudidayakan. Waktu panen yang lama dibandingkan komoditas pangan menyebabkan mereka enggan untuk membudidayakan tanaman keras. Sebagian besar petani di Desa Keseneng hanya menganggapnya sebagai penghasilan sampingan saja dan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri seperti bahan bangunan dan kayu bakar.

Selain tanaman keras, di bawah tegakan banyak pula rempah-rempah yang dapat tumbuh di Desa Keseneng, yaitu lada hitam, jahe, kayu manis, kapulogo, dan empon-empun. Tanaman tersebut masih tumbuh liar di tanah-tanah kosong dan belum dibudidayakan. Masyarakat belum menganggapnya sebagai komoditas yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sebagian besar masyarakat desa belum berupaya mengelola hutan rakyat yang dimiliki secara maksimal. Mereka lebih suka membuka hutan tersebut untuk ditanami tanaman semusim seperti ketela pohon atau jagung. Hanya beberapa orang yang telah mengusahakan penanaman berbagai komoditas di hutan rakyat, seperti aren, kopi, cengkih, kakao, jengkol, petai, dan kelapa. Mereka umumnya adalah warga yang mempunyai akses keluar desa dan mendapat pengetahuan dari luar desa.

Berbagai kelemahan warga seperti tingkat pendidikan rendah, kepemilikan lahan pertanian/sawah tidak merata, keterbatasan pilihan mata pencaharian, dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal, bermuara pada tingkat kesejahteraan warga yang masih rendah. Dari 381 keluarga yang ada di Desa Keseneng, 333 keluarga atau 87% di antaranya termasuk kategori miskin (BPS 2009 dalam Desa Keseneng 2010). Komposisi keluarga miskin pada tiap dusun ditunjukkan pada Tabel 6.

Sejarah pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng

Perkembangan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau CBNRM di Desa Keseneng mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, CBNRM dapat berjalan dan berkembang dengan baik karena ada dukungan kebijakan dan peraturan, warga menjadi pelaku utama sejak proses perencanaan, ada kesepakatan bersama yang dijalankan, dan ada keinginan kuat warga untuk selalu berkembang. Faktor-faktor tersebut membuat kepercayaan dan dukungan dari pihak luar semakin kuat sehingga turut mendukung perkembangan CBNRM di Desa Keseneng.

Keinginan warga untuk dapat mengelola kekayaan sumber daya alam, terutama air terjun menjadi objek wisata yang dapat memberikan keuntungan bagi desa, telah digagas sejak tahun 1980-an. Namun keinginan tersebut tidak terwujud karena kondisi pemerintahan masih sangat sentralistik dan *top down*, dimana partisipasi masyarakat kurang mendapat tempat. Pemerintah Desa Keseneng beberapa kali telah mengusulkan pembukaan objek wisata

Curug Paleburgongso ke Pemerintah Kabupaten Semarang. Namun usulan tersebut tidak mendapat tanggapan. Lambat laun, keinginan Pemerintahan Desa untuk maju, terkubur dalam perjalanan waktu.

“Tak kurang-kurangnya kami meminta Pemerintah Kabupaten mendukung dan membuka objek wisata di desa kami. Pendahulu saya sudah mengusulkan, bahkan ketika saya masih menjabat. Namun pemerintah kabupaten tak juga memberikan tanggapan....” (Mbah Sabar, kom. pri. 2012)

Sejak era Reformasi, terjadi perubahan besar terhadap wewenang pemerintahan desa. Kebijakan desentralisasi juga menguat. Hal ini membawa babak baru bagi pengembangan CBNRM di Desa Keseneng. Upaya agar dapat hidup lebih baik, terutama lepas dari kemiskinan yang selama ini membelit warga, mendorong desa untuk bergerak. Hidup nyaman, mudah, dengan ketersediaan sarana-prasarana penunjang menjadi tekad bersama warga Desa Keseneng. Karena itu, warga bersama-sama berusaha untuk mewujudkannya.

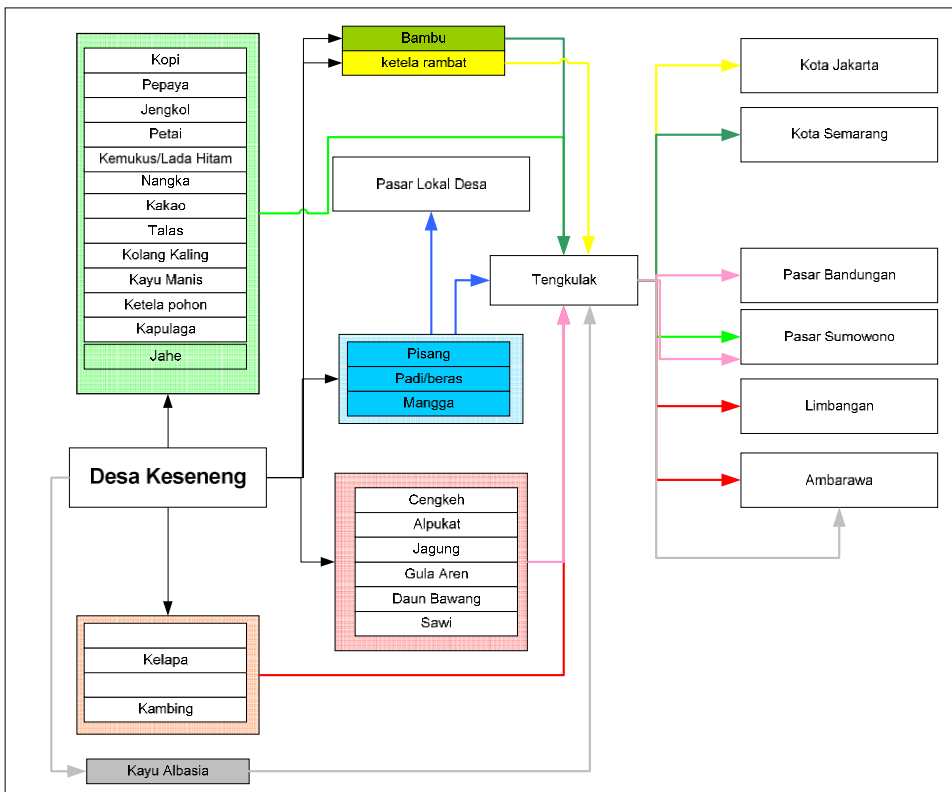
Ada beberapa sarana yang sangat vital bagi warga, yakni jalan, balai desa, sarana pengairan, baik untuk pertanian maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, serta masjid sebagai sarana ibadah yang perlu segera dibenahi. Pembangunan atau perbaikan sarana-sarana vital tersebut membutuhkan modal yang sangat besar.

Di sisi lain, kemampuan keuangan Desa Keseneng tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya pembangunan desa. Dukungan dana pembangunan dari pemerintah di atasnya, mulai dari pusat hingga daerah, seperti alokasi dana desa (ADD) atau PNPM Mandiri Pedesaan, dan

APBD kabupaten, jumlahnya sangat terbatas. Terlebih selain ADD, dana-dana tersebut diperebutkan oleh ribuan desa se-Indonesia. Bila pembangunan desa hanya mengandalkan dana-dana tersebut, akan berjalan sangat lambat karena harus dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana. Bahkan, dana pembangunan yang dikururkan pemerintah seringkali tidak sesuai kebutuhan atau prioritas desa.

Berbagai keterbatasan dan tuntutan percepatan pembangunan desa tersebut menuntut pemerintah desa dan warganya untuk mencari solusi kreatif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk memaksimalkan pendapatan desa adalah dengan menyewakan tanah kas desa dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, warga desa berpartisipasi dalam bentuk iuran untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan desa.

Dalam berbagai rembuk antara pemerintah desa dan warga, disepakati bahwa iuran wajib bagi warga untuk mendukung pembangunan desa tersebut berupa hasil penambangan batu. Setiap keluarga di desa, wajib menyerahkan hasil tambang batu 0,5 m3/setiap orang dan dana Rp 500.000-Rp 1000.000/keluarga. Batu-batu yang terkumpul tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama digunakan sebagai bahan pembangunan sarana-prasarana yang tengah dikerjakan. Sebagian lainnya dijual untuk membeli bahan bangunan lain seperti bambu dan kayu milik warga maupun bahan yang tidak bisa diproduksi desa seperti semen dan besi. Dana yang terkumpul juga digunakan untuk membayar tukang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh warga secara gotong-royong.



Gambar 6. Alur pemasaran hasil pertanian Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

“Warga iuran Rp 500.000-1.000.000 setiap keluarga dan iuran batu 0,5 m³ setiap orang. Misal satu keluarga empat orang, ya berarti 2 m³/keluarga. Setiap dukuh juga wajib mengirim warga untuk kerja bakti bergilir...” (Rohadi, kom. pri. 2012)

Upaya mengumpulkan dana pembangunan lewat iuran wajib berupa batu tersebut, ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Pertama, kondisi lingkungan Desa Keseneng, baik alam maupun infrastruktur jalan, terancam rusak akibat penambangan batu. Kedua, angkutan batu yang hilir mudik melewati jalan-jalan penghubung antardesa juga menuai kecaman dari desa-desa lain. Warga desa lain khawatir jalan penghubung antar desa cepat rusak. Sementara dari dalam desa, muncul keberatan warga atas beban berat yang harus mereka tanggung. Sebab selain kerja bakti wajib, warga juga masih harus menyerahkan iuran dana dan batu. Akibatnya, banyak waktu warga yang tersita untuk kepentingan desa. Faktor lain, tidak semua warga mampu menambang batu sehingga harus mengganti kewajibannya dengan iuran dana senilai setoran batu yang diwajibkan tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut memaksa Pemerintah Desa Keseneng berpikir keras mencari alternatif pendanaan yang mampu meringankan beban warga sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Saat itulah, gagasan lama untuk menghidupkan berbagai potensi yang dimiliki, seperti Curug Paleburgongso muncul kembali. Desa Keseneng juga masih memiliki delapan air terjun lainnya yang dapat dikembangkan untuk atraksi wisata. Potensi lain, terdapat makam Kiai Mandung dan Mata Air Kedungwali yang telah menjadi tujuan para peziarah lokal dari sekitar Desa Keseneng. Keinginan pemerintah desa dan warga semakin kuat tatkala objek-objek wisata di dekat desa, yakni kawasan Bandungan dan Candi Gedungsongo telah berkembang pesat.

Pada awal tahun 2010, salah satu curug, yakni Paleburgongso akan dikembangkan oleh warga Desa Keseneng. Namun rencana desa mengembangkan curug di perbatasan antara Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dan Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal tidak berjalan lancar. Warga Desa Gondang lebih dulu membuka akses ke Curug Paleburgongso. Hal tersebut memicu konflik antara Desa Keseneng dengan Desa Gondang karena air terjun berada di perbatasan, tetapi Goa Paleburgongso telah masuk wilayah dan berada di lahan milik warga Dusun Keseseh, Desa Keseneng. Pihak Desa Gondang juga tidak berkoordinasi dengan Desa Keseneng, padahal warga Desa Keseneng telah melakukan berbagai persiapan, baik lewat rembuk di tingkat dusun maupun desa untuk membuka objek wisata tersebut. Puncak konflik terjadi saat akses Curug Paleburgongso arah Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal akan diresmikan oleh Bupati Kendal, terjadi amuk warga Desa Keseneng. Warga menutup Curug Paleburgongso dengan tebaran rumpun bambu. Akibatnya, Bupati Kendal dan rombongan tidak dapat melihat Curug dan Goa Paleburgongso.

“Kami akui saat itu kami marah karena pihak Gondang tidak berkoordinasi dengan warga Desa Keseneng.

Akhirnya, kami memotong rumpun-rumpun bambu dan memasukkannya ke curug. Sehingga, saat akan diresmikan, Bupati Kendal dan rombongan tidak bisa melihat curug tersebut...” (Amin Sobirin, kom. pri. 2012)

Kejadian tersebut menimbulkan masalah yang cukup pelik. Bupati Kendal Siti Nurmarkesi melayangkan surat protes kepada Bupati Semarang Siti Ambar Fathonah. Untuk meredam konflik, Bupati Semarang menugaskan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Foto Goa dan Curug Paleburgongso yang disengketakan ditunjukkan pada Gambar 7.

Disporabudpar Pariwisata Kabupaten Semarang menindaklanjuti dengan mengirim tim ke Desa Keseneng, Kecamatan Somowono. Tim tersebut melakukan observasi dan survey bersama warga desa untuk melihat potensi pengembangan pariwisata. Dalam pertemuan tersebut muncul dua opsi, yaitu tetap mengembangkan Curug Paleburgongso meskipun ada konflik dengan Desa Gondang atau mencari objek lain di desa tersebut untuk dikembangkan. Pada survei tanggal 2 Februari 2010, masyarakat Desa Keseneng didampingi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang akhirnya memutuskan opsi kedua yaitu mengembangkan kawasan wisata Curug Tujuh Bidadari. Kawasan wisata tersebut mengandalkan tiga objek utama, yaitu Curug Tujuh Bidadari, Curug Kemuning, dan Mata Air Kedungwali yang dipercaya bertuah. Disporabudpar berjanji akan mendatangkan Bupati Kabupaten Semarang untuk meresmikan kawasan wisata tersebut dengan syarat pihak desa sudah melakukan penataan kawasan.

Pihak Desa Keseneng semakin bersemangat untuk mengembangkan potensi sumber daya alamnya karena mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang telah ditunggu sejak lama. Pada Tanggal 2 Mei 2010, warga Desa Keseneng menggelar rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan wakil organisasi lainnya. Dalam rapat tersebut dibentuk organisasi pengelola atau disebut panitia curug yang bertugas mengelola dan mengembangkan kawasan wisata yang kini dikenal dengan sebutan objek wisata Curug Tujuh Bidadari.

Sejak saat itu, pengelola di bawah komando Kadus Keseneng Basuki bersama warga mulai melakukan pembenahan di kawasan tersebut. Mereka membuat sarana prasarana seperti gasebo nonpermanen dengan bambu untuk tempat istirahat, jembatan, toilet, mushala, dan deretan kios yang menjajakan berbagai kebutuhan pengunjung. Selain itu, jalan-jalan menuju objek-objek di dalam maupun menuju kawasan juga dibenahi untuk memudahkan pengunjung sampai objek wisata.

Pada tanggal 20 Mei 2010, objek wisata Curug Tujuh Bidadari diresmikan oleh Plt. Bupati Kabupaten Semarang Hj. Siti Ambar Fathonah. Curug Tujuh Bidadari mulai dipublikasikan sebagai objek wisata, baik oleh Pemkab Semarang maupun dukungan publikasi media massa. Curug Tujuh Bidadari mulai dikenal dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Wisatawan mulai ramai berkunjung ke Curug Tujuh Bidadari.



Gambar 7. Goa dan Curug Paleburgongso yang disengketakan dua desa

Pada awal-awal pembukaan curug, jumlah rata-rata wisatawan yang berkunjung mencapai 8.000 orang/bulan. Oleh karena itu, Desa Keseneng pada enam bulan pertama bisa membukukan pendapatan Rp 160 juta meskipun tiket masuk sangat murah, hanya Rp 5.000 untuk dua orang dengan satu motor. Pendapatan tersebut belum termasuk uang dari kotak toilet dan Kedungwali. Dana dari dua item tersebut langsung disetorkan kepada panitia pembangunan masjid. Sebagian besar pendapatan objek wisata digunakan untuk pengembangan kawasan wisata dan mengembalikan dana swadaya yang terkumpul dari panitia. Sebagian lagi digunakan untuk biaya operasional dan gaji pekerja harian di kawasan wisata.

Masyarakat desa mulai merasakan manfaat pengelolaan sumber daya alam lewat pariwisata. Salah satunya adalah warga dibebaskan dari kewajiban menambang batu sebanyak 0,5 m³/orang. Dana pembangunan desa dapat dipenuhi dari pendapatan wisata.

“Pendapatan curug pada tahap awal lebih banyak untuk mengembalikan dana-dana iuran pengurus dan menambah objek wisata yang ada. Saat itu fasilitas curug hanya seadanya...” (Basuki, kom. pri. 2012)

Keberhasilan membukukan pendapatan yang besar memberikan manfaat positif bagi warga, namun di sisi lain justru menimbulkan konflik. Sebagian warga mencurigai pengurus menggunakan dana yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, warga desa yang jauh dari objek wisata, yaitu warga Dusun Keseseh dan Telawah merasa cemburu dan menganggap manfaat objek wisata tersebut hanya dinikmati warga Dusun Keseneng. Perpecahan semakin meruncing, bahkan sebagian besar warga ingin menutup objek wisata tersebut.

Untuk meredam konflik dan menghindari perpecahan warga, Pemerintah Desa Keseneng menyelenggarakan perencanaan desa dengan didampingi LSM Komunitas Salunding. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 November 2010 dengan melibatkan seluruh komponen warga. Perencanaan desa tersebut diikuti oleh lebih dari seratus orang warga yang terdiri atas perwakilan dusun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan

organisasi kemasyarakatan, pemilik lahan di sekitar objek wisata, dan warga yang berminat turut mengembangkan pariwisata di Desa Keseneng. Dalam kegiatan tersebut, semua peserta berpartisipasi dalam mengurai permasalahan yang membelit dan mencari solusi bersama.

Perencanaan desa tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2011-2015 yang menjadi panduan pembangunan desa selama lima tahun serta Raperdes Wisata yang mencakup aturan pengelolaan dan rencana pengembangan pariwisata desa. Dengan dokumen tersebut, dukungan dari pihak luar mulai masuk ke desa, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun Pemerintah Pusat. Dukungan paling utama adalah pemberian kewenangan bagi masyarakat desa untuk melanjutkan pengelolaan sumber daya alam melalui pariwisata. Selain itu, izin penambangan batu di Desa Keseneng dihilangkan dalam RTRW Kabupaten Semarang dan Kecamatan Sumowono ditetapkan sebagai kawasan wisata berbasis budaya, alam, dan agrowisata.

Sementara itu, meskipun Raperdes Wisata Keseneng belum disahkan menjadi perdes karena masih membutuhkan penyusunan RTRW Desa dan *detail engineering design*, peraturan terkait bagi hasil dan penggunaan penghasilan desa telah diterapkan. Dampak dari pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah konflik mereda dan warga kembali mendukung pengelolaan pariwisata. Sumber daya alam lain di luar kawasan Curug Tujuh Bidadari juga mulai dikembangkan sebagai objek wisata baru.

”Semula di antara warga timbul ketidaksetujuan terhadap pengurus wisata karena menganggap hasil wisata hanya dinikmati pengurus. di tingkat desa, dua dusun lain yakni Telawah dan Keseseh menganggap manfaat Curug C7B hanya untuk Dusun Keseneng. Akibatnya, dusun enggan mengirim warga untuk kerja bakti di tingkat desa. Namun setelah perencanaan desa ada kesepakatan bagi hasil. Meski belum dijadikan perdes, kesepakatan tersebut dijalankan. Ada bagi hasil yang jelas seperti persentase untuk pembangunan di dusun-dusun, pemilik lahan, untuk kegiatan organisasi sosial, upacara adat, serta dana sosial

yang langsung dirasakan warga, hubungan ditingkat desa dan warga kembali membaik. Konflik dan kecurigaan hilang. Semua juga tercatat dengan baik dan dilaporkan secara berkala kepada warga...” (Mursalim, kom. pri. 2012)

Desa Wisata Keseneng terus berbenah mengembangkan desanya. Pengembangan yang dilakukan tidak hanya pada objek wisatanya, namun sumber daya alam lain yang mendukung juga dikembangkan, misalnya pengembangan tanaman aren serta penataan tata guna lahan dan zonasi kawasan desa. Aspek-aspek lain yang mendukung perkembangan CBNRM seperti sumber daya manusia dan sarana-prasarana desa juga terus dikembangkan. Beberapa kekurangan dan kelemahan yang mewarnai pelaksanaan CBNRM di Desa Keseneng dijadikan modal bagi masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik.

Fungsi/aktivitas pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng

Perencanaan (Planning)

Masyarakat Desa Keseneng sudah melakukan perencanaan partisipatif dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Perencanaan awal pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng dilakukan pada tanggal 2 Mei 2010 dalam rapat desa yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pada tahap ini perencanaan hanya dilakukan untuk mengelola Curug Tujuh Bidadari sebagai tujuan wisata sehingga yang dilakukan baru sebatas membentuk pengurus pengelola Curug Tujuh Bidadari.

Adapun strategi-strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan belum ditentukan sehingga kegiatan yang dilakukan masih bersifat spontanitas sesuai arahan kepala desa. Peran kepala desa sangat dominan dalam menentukan langkah-langkah pengembangan. *“Tahap awal pembentukan panitia pengelola curug memang hanya pemerintahan desa dan perwakilan organisasi, seperti pemuda. Ketika itu kami belum memiliki rencana matang, hanya ingin segera membentuk pengurus agar dapat secepatnya mempersiapkan tempat wisata. Dalam pertemuan durembug pengelola, tetapi semua bergantung keputusan kepala desa, seperti pemilihan ketua dan pengurus lain. Terlebih, pengelolaan ini masih tahap awal dan belum tentu berhasil. Intinya, desa ingin agar dapat mengelola C7B untuk meredam konflik dengan warga Gondang...”* (Margianto, kom. pri. 2012)

Sebagai tindak lanjut perencanaan awal, Desa Keseneng melakukan perencanaan detail pengelolaan sumber daya alam dalam perencanaan desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November 2010 dengan difasilitasi LSM Komunitas Salunding. Warga desa berkumpul mengadakan rembug warga dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rembug warga dilakukan oleh perwakilan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, perangkat desa, dan Dewan Perwakilan Desa.

Perencanaan yang dilakukan desa, mencakup analisis mengenai daya dukung lingkungan, model pemanfaatan ekonomi maksimal yang dapat mempertahankan daya

dukung lingkungan, tahapan-tahapan aksi yang jelas berdasar modal yang dimiliki, dan model monitoring dan evaluasi yang tegas. Perencanaan tersebut juga mencakup peran para pihak, beserta tugas serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Karena itu, perencanaan tersebut wajib dipahami dengan benar oleh pihak yang akan melaksanakannya, dalam hal ini semua stakeholder yang ada di desa.

Kegiatan perencanaan desa tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) membangun impian atau visi desa; (ii) mengidentifikasi dan memetakan potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang sudah ada; (iii) mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang menjadi kendala pengembangan desa; (iv) menyusun alternatif program untuk memecahkan masalah menggunakan potensi yang dimiliki; (v) menyusun kebijakan pembangunan yang terdiri dari kerangka logis pengembangan desa dan kerangka logis pengembangan Desa Wisata Keseneng.

Dari kegiatan perencanaan desa tersebut disepakati untuk mengembangkan Desa Keseneng sebagai desa wisata dengan visi “ Menuju Desa Wisata Keseneng yang makmur dan mandiri”. Adapun visinya adalah; (i) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang wisata; (ii) Meningkatkan kualitas SDM untuk mengelola sektor wisata dan pertanian secara mandiri; (iii) Membangun aparat desa yang terampil; (iv) Membangun desa wisata terpadu dan berkelanjutan; (v) Membuka keterlibatan masyarakat dalam segala aktivitas pemerintah; dan (vi) Membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa (Desa Keseneng 2011). Suasana kegiatan perencanaan desa terlihat pada Gambar 8.

Kegiatan perencanaan desa tersebut merupakan bagian dari pemahaman desa secara partisipatif atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dimana pihak luar lebih berperan sebagai katalis dan fasilitator yang memungkinkan masyarakat desa melakukan analisis tentang mereka sendiri, serta melakukan perencanaan dan mengambil tindakan yang paling sesuai untuk mereka (Chambers, 1992).

Model perencanaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perencanaan model baru dan memenuhi karakteristik yang diajukan oleh Friedman (1993), yaitu bersifat normatif, inovatif, bersifat politik, transaktif, dan berdasar pada pembelajaran sosial. Perencanaannya adalah masyarakat desa sendiri dan mereka memegang teguh norma-norma dan nilai ideal yang paling sesuai dengan karakteristik mereka. Dengan demikian Perencanaan yang dilakukan memberikan solusi kreatif dan fleksibel atas permasalahan yang sudah dialami selama berpuluh-puluh tahun. Kepemimpinan yang kuat juga mendukung keberanian untuk merencanakan tindakan baru yang dianggap mampu memberikan solusi terbaik dan bersedia untuk belajar dari kesalahan.

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng dilakukan sesuai kebutuhan pada awal perencanaan dan secara fleksibel berubah sesuai

perkembangan kebutuhan. Kepala desa memegang peranan penting dalam pengorganisasian tersebut.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam pengorganisasian pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng. Posisi vital pemimpin sangat menentukan keberhasilan CBNRM karena pemimpin merupakan figur yang menjadi panutan dan akan diikuti oleh warganya. Pemimpin juga menjadi hakim yang akan memutuskan berbagai aspek yang menyangkut tindakan dalam sebuah pengelolaan. Setelah melalui berbagai rembuk dengan usulan-usulan dan rumusan dari bawah, perlu sosok yang dapat dijadikan juri yang adil dan dapat mengakomodasi keinginan masyarakat.

Kepemimpinan di tingkat desa tidak bisa lepas dari figur pemimpin itu sendiri karena ketergantungan masyarakat pada pemimpin sangat tinggi. Sebuah isu kecil pun menjadi sangat sensitif dan cepat membesar, mengingat masyarakat sangat homogen dengan pengetahuan yang belum begitu tinggi. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap sosok individu pemimpin, dalam hal ini kepala desa, sangat riskan karena keputusan seseorang belum tentu tepat dalam menghadapi begitu banyak permasalahan.

Untuk mencegah ketergantungan tersebut, diperlukan kearifan seorang pemimpin lokal yang mau membagi tugas dengan mendistribusikan kewenangannya kepada beberapa level kepemimpinan yang ada di bawahnya. Hal inilah yang dimiliki Kepala Desa Keseneng, dalam pengelolaan sumber daya alam dengan fokus pariwisata. Dia mampu mendistribusikan wewenangnya pada beberapa level dan memilih sosok-sosok yang tepat dalam menjalankan pengelolaan wisata. Pemilihan ketua pengelola yang memiliki sosok tegas dalam melaksanakan kebijakan desa yang telah disepakati dan menjadi mandat dari pemimpin desa, pengelola administrasi yang rapi, dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan, menciptakan kepemimpinan berbasis sistem.

“Setiap tugas, saya serahkan kepada orang yang benar-benar dianggap atau sudah terbukti mampu di bidangnya, seperti penempatan Pak Bas sebagai ketua, Mursalim yang saat itu bendahara merangkap sekretaris dan pembukuan. Untuk Marget yang berpengalaman menjadi SAR. Saya mempercayai para petugas dan hanya melakukan pengawasan dan memberi masukan bila dimintai pendapat. Saya juga mengajak diskusi pengurus curug dan mendengar masukan mereka. Salah satunya, mengangkat bendahara tersendiri di luar sekretaris, karena beban kerja Mursalim begitu berat. Dampaknya, roda organisasi dapat berjalan lancar...” (Maskuri, kom. pri. 2012)

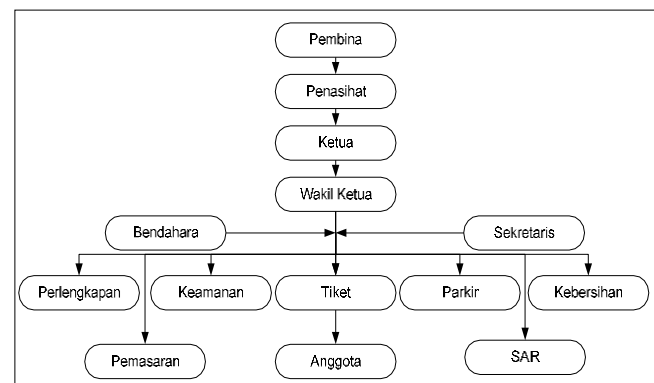
Dengan demikian, kepala desa benar-benar memegang peran kebijakan umum, fungsi kontrol, dan melakukan pertanggungjawaban kerja tim yang dibentuk, langsung pada lembaga-lembaga di desa dan warga. Selain itu, kemampuan pemimpin untuk merangkul berbagai pihak, seperti pemimpin terdahulu, tokoh lain di desa yang memiliki pengaruh luas, dan mau menerima pendapat dari pihak luar yang memiliki keahlian khusus dan lebih, membuat arah kepemimpinan yang terbentuk semakin kuat.

Pengorganisasian pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng direncanakan berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang membawahi berbagai unit usaha. Namun, hingga saat ini masih menggunakan organisasi pelaksana yang dibentuk pada awal dikembangkannya wisata Curug Tujuh Bidadari, yaitu Pokdarwis C7B yang merupakan binaan Disporabudpar Kabupaten Semarang. Adapun struktur organisasinya seperti pada Gambar 9, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya ditunjukkan pada Tabel 7.

Organisasi pengelola yang oleh warga sering disebut sebagai panitia tersebut pemilihan personelnnya tidak melalui pemilihan secara demokratis, namun ditunjuk oleh kepala desa yang bertindak sebagai penasehat. Adapun anggotanya terdiri dari perangkat desa dan beberapa tokoh pemuda. Alasan penunjukan tersebut adalah karena pengembangan wisata baru dirintis dan belum menunjukkan hasilnya sehingga dipilih perangkat desa yang bersedia bekerja tanpa dibayar, bahkan sebaliknya harus mengeluarkan dana untuk mendukung pengembangan wisata.

“Sebagai antisipasi jika pengelolaan wisata nantinya gagal, kami memang memilih pengurus dari perangkat serta orang yang benar-benar mau berkorban. Sebab, modal awal kami nol rupiah sehingga pengelola awal C7B adalah orang yang mau bekerja tanpa dibayar, bahkan mau berkorban menyisihkan dananya untuk pengembangan wisata. Perangkat dipilih karena sudah punya gaji dan memang berkewajiban memikirkan serta mengupayakan kemajuan desa...” (Basuki, kom. pri. 2012)

Proses pengorganisasian yang tidak demokratis tersebut pada awalnya tidak menimbulkan masalah, namun setelah wisata berkembang muncul kecemburuan dari sebagian warga yang tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, dengan kepemimpinan kepala desa dan ketua pengelola yang kuat, masalah tersebut dapat diatasi. Pergantian beberapa personel organisasi yang mengundurkan diri diumumkan secara terbuka sehingga memberikan peluang yang sama bagi warga masyarakat yang lain untuk turut terlibat.



Gambar 9. Struktur organisasi pengelola Curug Tujuh Bidadari, Desa Keseneng

Tabel 7. Tugas dan tanggungjawab pengelola Curug Tujuh Bidadari, Desa Keseneng

Jabatan	Tugas dan tanggung jawab
Ketua dan wakil ketua	Memimpin, mengarahkan, serta memonitor seluruh aktivitas kerja anggota, baik sekretaris, bendahara, maupun seksi-seksi teknis Wakil ketua bertugas untuk membantu dan atau menggantikan bila ketua berhalangan Menandatangani surat keluar bersama sekretaris Memimpin rapat umum pengelolaan Curug Tujuh Bidadari Bertanggung jawab kepada Kepala Desa Keseneng dan bersama dengan sekretaris dan bendahara membuat laporan secara tertulis
Bendahara	Bersama ketua dan sekretaris menyusun dan menetapkan anggaran kepanitiaan Mengelola keuangan panitia Mengeluarkan uang dengan sepengetahuan ketua dan sekretaris Memonitor dan mengontrol usaha-usaha pencarian dana baik dari tiket, retribusi parkir, toilet, <i>homestay</i> , maupun usaha lainnya Menyusun laporan keuangan yang dibacakan pada rapat bulanan panitia Mengelola bidang keuangan yang meliputi penerimaan, penyusutan, pengeluaran kebutuhan yang telah disepakati pengurus/dan mendapat persetujuan ketua
Sekretaris	Bersama dengan ketua memimpin, mengarahkan, mengordinir, serta memonitor seluruh aktivitas pengelola Curug Tujuh Bidadari Membuat dan menandatangani surat keluar Mempersiapkan rapat-rapat panitia Bersama dengan ketua dan bendahara menyusun dan menetapkan anggaran kepanitiaan Bersama ketua mewakili panitia undangan keluar Bersama ketua dan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Kepala Desa Keseneng Mencatat atau mendokumentasikan segala surat menyurat dan aktivitas pengelola Curug Tujuh Bidadari, baik dari seksi-seksi teknis ataupun lainnya Merancang dan menyusun jadwal kerja sesuai hasil rapat pengurus Curug Tujuh Bidadari
Sie Perlengkapan	Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung Mencatat dan melakukan perawatan secara berkala setiap sarana dan prasarana yang dimiliki Unit Usaha Curug Tujuh Bidadari Melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Bersama anggota unit usaha yang lain membangun fasilitas/sarana prasarana yang baru dan dirasa dibutuhkan untuk pengembangan Unit Usaha Curug Tujuh Bidadari. Mencatat, menjadwalkan, dan mengoordinasi penggunaan jasa/penyewaan sarana-prasarana seperti gazebo, lokasi pemotretan <i>prewedding</i> . Menyediakan dan menyewakan alat-alat keselamatan bagi pengunjung seperti baju pelampung dan pakaian renang yang pantas di lokasi pemandian curug. Mencatat dan melaporkan segala aktivitas dan pemasukan yang diperoleh dari pengunjung atas penyediaan jasa-jasa tersebut dan melaporkannya pada ketua melalui sekretaris Menyetorkan hasil penyewaan jasa sarana-prasarana kepada bendahara .
Sie Pemasaran	Mempromosikan potensi Curug Tujuh Bidadari, melalui berbagai sarana baik media, internet, ataupun sarana lain yang dirasa dapat meningkatkan kunjungan ke Curug Tujuh Bidadari. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang dapat mendatangkan atau meningkatkan kunjungan ke Curug Tujuh Bidadari. Contohnya pihak hotel, pemandu wisata luar, organisasi atau lembaga lain dalam rangka mempromosikan Curug Tujuh Bidadari. Merancang dan menyelenggarakan <i>event-event</i> yang dapat meningkatkan kunjungan dan pendapatan Unit Usaha Curug Tujuh Bidadari. Merancang wahana baru berupa paket-paket perjalanan yang bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke Curug Tujuh Bidadari. Mendorong perkembangan sektor usaha lain seperti kerajinan, kesenian, dan atraksi lain sebagai penunjang kunjungan wisatawan. Mencatat setiap perkembangan pemasaran dan melaporkannya kepada ketua melalui sekretaris Menyetorkan segala pendapatan dari berbagai event wisata kepada bendahara.
Sie Keamanan	Menjaga keamanan kawasan wisata Curug Tujuh Bidadari. Berkoordinasi dengan seksi-seksi untuk meningkatkan keamanan kawasan Curug Tujuh Bidadari, seperti seksi parkir, seksi tiket, dan seksi perlengkapan dari gangguan orang-orang/pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Mengawasi aturan yang diberlakukan di Curug Tujuh Bidadari. Contohnya, mencegah pengunjung yang membawa minuman keras. Meredam kerusuhan atau gangguan keamanan di Curug Tujuh Bidadari.

	<p>Merancang sistem pengamanan untuk mengantisipasi jumlah kunjungan dan <i>event</i> yang diselenggarakan seksi lainnya.</p> <p>Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib menyangkut pelanggaran hukum di kawasan Curug.</p> <p>Menertibkan pelanggaran-pelanggaran kawasan yang dilakukan oleh setiap pihak yang dapat mengganggu keberlangsungan Wisata Curug Tujuh Bidadari. Termasuk, pelanggaran tata ruang.</p>
Sie Tiket	<p>Melayani pengunjung yang memerlukan tiket masuk dan parkir di lokasi Curug Tujuh Bidadari</p> <p>Dalam menjalankan tugas, petugas piket wajib bersikap ramah dalam menerima pengunjung serta memberi keterangan/informasi yang diminta pengunjung</p> <p>Mencatat segala pemasukan dari tiket masuk dan memberikan laporan berkala ketua melalui sekretaris</p> <p>Menjalankan tugas secara jujur dan menghindari penyimpangan</p> <p>Menyetorkan hasil penjualan tiket kepada bendahara, setiap hari setelah objek wisata Curug Tujuh Bidadari tutup pukul 16.30</p> <p>Memberikan informasi yang baik dengan tidak lagi menerima pengunjung ke objek wisata Curug Tujuh Bidadari setelah waktu berkunjung habis. Pengecualian untuk pengunjung yang berencana kemah atau menginap di <i>homestay</i> yang telah disediakan pengelola</p>
Sie Parkir	<p>Mengatur dan mengarahkan pengunjung yang akan parkir di kawasan Curug Tujuh Bidadari agar tempat parkir menjadi rapi dan baik</p> <p>Mengawasi dan menjaga keamanan di lokasi parkir baik sepeda motor/mobil sampai dengan pengunjung selesai dengan penuh rasa tanggung jawab</p> <p>Menyediakan layanan jasa penitipan barang seperti helm atau barang-barang tertentu dari pengunjung</p> <p>Melakukan pengecekan terhadap mobil dan kendaraan pengunjung yang akan meninggalkan lokasi parkir. Pengecekan tersebut berupa tiket parkir atau surat kendaraan/identitas pengunjung yang kehilangan tiket</p> <p>Dengan tegas menahan kendaraan atau mobil yang dianggap mencurigakan dan pengendara tidak dapat menunjukkan surat-surat baik tiket parkir/STNK/identitas diri.</p> <p>Melakukan pelayanan yang baik kepada pengunjung sehingga pengunjung dapat keluar lokasi parkir dengan tertib.</p> <p>Segera berkoordinasi dengan pengelola yang lain hingga direktur dan pihak yang berwajib jika terjadi kehilangan kendaraan, mobil, ataupun barang lain yang dianggap dapat merugikan pengunjung</p>
Sie SAR	<p>Melakukan pengawasan terhadap pengunjung dengan tujuan menjaga keselamatan pengunjung.</p> <p>Mempersiapkan segala sarana-prasarana memadai yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan pada pengunjung. Contohnya peralatan P3K, perlengkapan keselamatan, seperti pelampung, ban penolong dilokasi curug, tandu, dan tali untuk tujuan penyelamatan.</p> <p>Menetapkan zona-zona berbahaya yang tidak boleh didatangi pengunjung.</p> <p>Memperingatkan pengunjung untuk mematuhi aturan-aturan keselamatan yang ditetapkan Unit Usaha Curug Tujuh Bidadari.</p> <p>Berkoordinasi dengan pihak lain ketika terjadi kejadian luar biasa sehingga jatuh korban.</p> <p>Meningkatkan kapasitas diri dibidang penyelamatan.</p> <p>Berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang berkait tugas-tugas penyelamatan, misal ambulans, pemadam kebakaran, SAR lain, dan rumah sakit.</p>
Sie Kebersihan	<p>Bertugas dan bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan objek wisata.</p> <p>Mengingatkan pengunjung untuk turut menjaga kebersihan lingkungan Curug.</p> <p>Bersama seksi perlengkapan mengadakan sarana-sarana kebersihan seperti tempat sampah di lokasi-loksi tertentu di kawasan Curug Tujuh Bidadari yang dianggap membutuhkan.</p> <p>Bersama seksi perlengkapan membuat ornamen-ornamen seperti taman untuk mempercantik kawasan-kawasan tertentu di Curug Tujuh Bidadari</p> <p>Merawat dan menjaga alat-alat kebersihan yang dimiliki sebagai bagian terpenting dari aset Unit Usaha Tujuh Bidadari.</p>

“Sekarang saat C7B mulai menghasilkan dan bisa memberikan pendapatan bagi pengurus, walaupun tidak besar, pemilihan pengurus selalu diumumkan secara terbuka di desa. Dengan demikian, warga benar-benar merasa mendapat hak yang sama untuk bisa menjadi pengurus. Yang terakhir, ketika butuh tim SAR, pengurus mengumumkan dan meminta warga yang berminat untuk mendaftar...” (Margianto, kom. pri. 2012)

Pengorganisasian pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng merupakan tahapan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki desa agar dapat berfungsi optimal untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana

dijelaskan oleh Tripathi & Reddy (2008), pengorganisasian tidak hanya dilakukan untuk menata sumber daya manusia ke dalam divisi-divisi dalam struktur organisasi, namun juga menata prasarana, peralatan, dan modal untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam.

Sumber daya manusia yang dimiliki desa sedapat mungkin ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula dengan sarana, prasarana, peralatan, dan modal yang diperoleh dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai kesepakatan bersama untuk mengembangkan desa.

Pelaksanaan (Actuating)

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat melalui desa wisata dilaksanakan bersama-sama oleh semua warga Desa Keseneng. Pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Ketika pembukaan objek wisata tersebut telah disepakati dalam rapat- rapat di desa, dan pada 2 Mei 2010 ditunjuk pengurus yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya, dana belum tersedia. Padahal, untuk membuka objek wisata dibutuhkan dana yang cukup besar meskipun hanya untuk membangun sarana-prasarana sederhana.

Pada awal pengembangan objek, paling tidak dibutuhkan sarana parkir, loket, gasebo, bangku-bangku untuk istirahat, kamar mandi, jembatan, mushala, dan deretan kios. Dengan demikian, kebutuhan dasar wisatawan akan terpenuhi. Untuk mengatasi masalah pendanaan, warga yang terpilih menjadi pengurus mengumpulkan dana dari iuran dari kantong pribadi, dan terkumpul dana sebesar 20 juta rupiah. Dana tersebut hanya cukup untuk membeli bahan material yang terbatas, sedangkan untuk biaya tukang belum cukup.

Keterbatasan tersebut diatasi dengan sistem kerja bakti seperti yang terlihat pada Gambar 10. Warga tiap dusun secara bergilir melakukan kerja bakti membenahi kawasan Curug Tujuh Bidadari hingga siap dibuka. Sarana dan prasarana yang dibangun masih sangat sederhana, hanya asal tersedia tanpa mempertimbangkan segi estetika. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana dikerjakan secara gotong royong, tanpa tenaga ahli bidang wisata. Meski demikian, ada nilai sangat positif dari gotong royong tersebut. Warga yang selalu terlibat aktif menaruh harapan besar bahwa kawasan wisata tersebut dapat berkembang dan merasa memilikinya.

“Pada awal-awal pembukaan curug, fasilitas yang ada sangat terbatas. Contohnya belum ada gapura masuk dan tempat loket. Saya yang bertugas sebagai penjual tiket hanya menggunakan meja kecil di pinggir jalan menuju curug. Ketika panas atau hujan, saya hanya berbekal payung. Ya ketika itu benar-banar bermodal semangat agar wisata curug berhasil karena ini usaha bersama warga desa. Begitu juga warga yang terlibat langsung dalam kerja bakti membenahi curug. Harapannya, wisata maju dan terbuka peluang usaha yang bisa menambah penghasilan warga. Kami tidak ingin wisata terhenti, apalagi seluruh warga telah bersusah payah untuk membukanya..” (Nur Kholimah, kom. pri. 2012)

Pelaksanaan CBNRM di Desa Keseneng menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Seluruh warga desa berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat memperoleh manfaat finansial dari pengelolaan sumber daya alam, dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan desa. Pada tahun 2011, Desa Keseneng membukukan pemasukan sebesar Rp. 307.883.000. Pendapatan sebesar itu diperoleh dari sumber-sumber seperti tiket masuk, parkir, dan retribusi warung seperti rincian pada Tabel 8. Selain pendapatan tersebut, masyarakat yang terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung adalah pekerja harian, pemilik warung, pemilik

homestay, dan masyarakat yang lahannya masuk dalam zonasi wisata.

Tabel 8. Pendapatan CBNRM Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Tahun 2011

Sumber	Pendapatan
Tiket	252.119.000
Parkir	47.003.000
Retribusi warung	3.045.000
Sewa Gazebo	1.155.000
Toilet	3.650.000
Penitipan helm	486.000
Bagi hasil home stay	100.000
Pre wedding	325.000
Jumlah	307.883.000

Penerima manfaat ekonomi secara tidak langsung adalah seluruh warga desa melalui sistem bagi hasil dengan Persentase yang disepakati bersama pada saat perencanaan. Persentase terbesar dimanfaatkan untuk pengembangan wisata, terutama pembangunan infrastruktur. Penerima bagi hasil lainnya adalah untuk pembangunan masjid, kas desa, dan kas dusun yang semuanya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga desa.

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, namun juga memberikan manfaat bagi perbaikan lingkungan. Untuk mendanai pembangunan Masjid, semula masyarakat menambang batu di bukit batu dan sungai. Kemudian disepakati untuk menghentikan penambangan, bahkan meminta pencabutan izin tambang yang sudah diberikan oleh bupati.

“Semula saya mengajukan izin ke Pemkab agar diperbolehkan membuka pertambangan batu di Desa Keseneng, melihat banyak potensi termasuk bukit-bukit warga yang sulit ditanami karena kaya akan batuan, Bisa dikatakan batu tidak habis ditambang untuk tujuh turunan. Bahkan surat izin penambangan sudah turun ke desa. Namun dengan pertimbangan bahwa penambangan batu akan merusak alam yang menjadi modal utama wisata desa, saya bersama pendamping dari Salunding, melakukan lobi ke Dinas untuk membatalkan izin tersebut. Terlebih dalam Raperda RTRW Kabupaten Semarang, izin pertambangan batu Keseneng masuk di dalamnya. Kepala Dinas Pariwisata waktu itu, Pak Agus menyambut baik dan meneruskan perjuangan kami ke insatansi terkait lainnya, seperti Bappeda dan Bidang SDA. Akhirnya, izin penambangan dibatalkan. Bahkan penambangan di larang se- Kecamatan Sumowono...” (Maskuri, kom. pri. 2012)

Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola untuk wisata tersebut, masyarakat sepakat untuk membagi zonasi desa kedalam zona inti yang berfungsi sebagai kawasan lindung, zona pemanfaatan tradisional, dan zona pemanfaatan ekonomi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perdes Pengembangan Desa Wisata Keseneng yang hingga saat ini masih berupa draf namun sudah mulai diimplementasikan. Masyarakat juga sepakat untuk menghentikan pengambilan ikan disungai dengan cara menyetrum atau meracun. Pengambilan ikan yang

dijinkan hanya dengan cara memancing atau menjaring sehingga ikan-ikan berukuran kecil tetap hidup dan berkembang biak.

Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan *community based* di Desa Keseneng membuka peluang terhadap akses dana maupun pembangunan sarana prasarana untuk menunjang kemajuan desa. Desa yang pada awalnya merupakan desa tertinggal dan tidak mendapat perhatian pemerintah, kini mulai berbenah dan tersentuh proyek-proyek pembangunan maupun aliran dana pemerintah, diantaranya adalah dana PNPM pariwisata pada tahun 2011 dan 2012, pengaspalan jalan dan pemavingan, serta pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam.

Pengendalian (Controlling)

Mekanisme pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng bersifat intern dan melibatkan seluruh warga secara bertahap. Setiap bulan, pengurus mengadakan rapat evaluasi yang hanya melibatkan pengurus. Dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi untuk melihat pencapaian-pencapaian maupun kendala yang dihadapi selama satu bulan. Selanjutnya mereka merencanakan target dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk bulan berikutnya. Selain itu, rapat juga mengevaluasi pendapatan dan rencana penggunaan anggaran. Tahap berikutnya, ketua pengurus bersama sekretaris memberikan laporan hasil evaluasi kepada kepala desa. Kepala desa memberikan masukan-masukan terkait hasil evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada warga dalam rapat desa. Laporan yang disampaikan dalam rapat desa tersebut adalah laporan keuangan yang bertujuan menjaga transparansi *cost and benefit* pengelolaan sumber daya alam melalui desa wisata. Peserta rapat desa memberikan masukan-masukan dan membahas rencana pemanfaatan pendapatan wisata tersebut.

Rambu-rambu pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng sebenarnya sudah tertuang dalam rancangan peraturan desa wisata. Namun setelah satu tahun penyusunannya, perdes tersebut masih berupa draf. Pemerintah desa enggan mengesahkan perdes tersebut menunggu terealisasinya maket pengembangan desa yang terkendala pendanaan. Akibatnya, kepala desa yang berkedudukan sebagai penasehat dan pengurus organisasi pengelola memegang peranan penting dalam pengendalian dan tergantung pada niat baik mereka. Warga desa belum memiliki akses untuk melakukan pengawasan secara langsung karena belum ada sistem yang mengatur.

Peran pihak luar dalam CBNRM di Desa Keseneng

Keberhasilan sebuah program, terutama di desa memang bergantung pada keinginan kuat dan tekad masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Meski demikian, peranan pihak luar juga tak kalah penting dalam ikut mendukung keberhasilannya. Demikian juga CBNRM di Desa Keseneng tidak terlepas dari peran pihak luar sebagai agen perubahan (*external change agent*). Pihak luar tersebut berperan sebagai fasilitator yang membantu mendefinisikan masalah, memberikan saran-saran independen, ide-ide baru, keahlian teknis, memberikan

pelatihan dan bantuan teknis, memandu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta membantu mengembangkan rencana pengelolaan (Pomeroy 2001). Beberapa pihak luar yang turut membantu pengembangan CBNRM di Desa Keseneng adalah Pemerintah Kabupaten Semarang, LSM, dan media massa. Setiap pihak memberikan sumbangsih, sesuai peran dan bidang masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Semarang

Peran Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Semarang sangat vital bagi keberlangsungan CBNRM di Desa Keseneng. Pada awal pengembangan wisata di Desa Keseneng, Disporabudpar memberi dorongan dan dukungan moral agar warga mau bergerak dan merintis pembukaan objek wisata Curug Tujuh Bidadari.

Disporabudpar juga memfalsifikasi desa untuk mempengaruhi kebijakan dinas/instansi lain, termasuk DPRD untuk mendukung CBNRM dengan pendekatan wisata di Desa Keseneng. Banyak program dinas lain di Kabupaten Semarang yang berhasil disinergikan untuk mendorong CBNRM dari berbagai sisi. Disporabudpar juga ikut memfasilitasi perjuangan Desa Keseneng hingga memperoleh dukungan Pemerintah Pusat, dalam hal ini program PNPM Mandiri Pedesaan sektor wisata oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia.

Salah satu langkah Disporabudpar paling vital dalam keberlangsungan CBNRM adalah mendorong penghapusan izin penambangan batu di Keseneng dalam Raperda RTRW Kabupaten Semarang. Peran Disporabudpar juga semakin jelas ketika dalam struktur pengelola Curug Tujuh Bidadari menjadi pelindung organisasi. Untuk memperlancar langkah pengelola, Disporabudpar juga mendorong legalitas organisasi pengelola wisata tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendamping

Semangat dan tekad yang kuat tetapi tanpa konsep yang jelas, justru akan mendatangkan kegagalan dan perpecahan. Hal itulah yang terjadi di Desa Keseneng pada awal-awal pelaksanaan CBNRM. Banyak persoalan yang muncul, terutama saat CBNRM di Desa Keseneng telah menghasilkan/mendatangkan keuntungan bagi desa. Alokasi penggunaan dana, rencana pengembangan wisata, dan masalah-masalah lain yang menyertainya, nyaris menciptakan kegagalan dan perpecahan di masyarakat.

Pada tahap inilah pendamping desa, yaitu LSM Komunitas Salunding mengisi perannya. LSM tersebut mendorong kemandirian desa dan memberi masukan dalam penataan konsep. Hal itu menjadi fondasi dan modal dasar bagi desa untuk melangkah. Fondasi tersebut lebih terfokus pembentukan pola pikir dan penguatan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni kemajuan desa.

Komunitas Salunding memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes 2011-1015) dan Raperdes Wisata. Dua pegangan ini menjadi kesepakatan bersama dan dijalankan Pemerintah Desa Keseneng dan pengelola wisata untuk menentukan

langkah-langkah advokasi, resolusi konflik, dan pengembangan ke depan. Konsep-konsep dasar dalam RPJMdes dan Raperdes Wisata yang dijalankan membuat CBNRM di Desa Keseneng tetap berjalan. CBNRM pun terus berkembang setahap demi setahap dengan berbagai kekurangan dan kelebihan.

Media massa

Keberhasilan CBNRM di Desa Keseneng dengan pendekatan wisata, tentu tak lepas dari peran media massa. Sebab, penghasilan utama dengan pendekatan ini bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh dikenal atau tidaknya objek tersebut oleh khalayak luas.

Hal ini dirasakan oleh Desa Keseneng. Objek dan atraksi wisata yang ditawarkan oleh Curug Tujuh Bidadari sebagai objek utama usaha desa, bisa dikatakan tidak lebih menarik jika dibandingkan dengan objek wisata alam yang dikelola swasta. Namun keberpihakan media pada usaha kemandirian Desa Keseneng yang tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mengutamakan aspek penyelamatan lingkungan, menjadi kekuatan tersendiri.

Isu-isu yang dipoles, terutama kemampuan desa untuk memberdayakan diri dan lingkungannya, mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Tidak hanya wisatawan yang ingin menikmati atraksi alam, tetapi juga yang ingin mengetahui model pengelolaan yang dilakukan desa, baik lewat studi banding maupun penelitian. Gempuran pemberitaan berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun cybernews, membuat kunjungan wisatawan tetap stabil dan meningkat. Dengan demikian, pundi-pundi penghasilan bagi desa juga meningkat.

Selain sebagai sarana promosi, posisi pemberitaan media juga menjadi sarana advokasi bagi Desa Keseneng untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain. Terlebih, media massa menjadi salah satu sarana yang kuat untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Hubungan harmonis dengan media massa tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan CBNRM.

Aspek-aspek *community based* dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng keadilan (*equity*)

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat melalui desa wisata di Desa Keseneng memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat desa. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung dinikmati oleh masyarakat desa. Kegiatan pengelolaan tersebut membuka lapangan pekerjaan maupun tambahan penghasilan untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Manfaat ekonomi secara langsung dari pendapatan wisata diterima oleh pekerja harian yang terlibat di lapangan, yaitu penjaga tiket, petugas kebersihan, juru parkir, petugas SAR, dan petugas keamanan. Mereka mendapat bagi hasil dari pendapatan tiket selama hari senin sampai sabtu. Pada hari minggu dan hari-hari libur nasional saat ramai pengunjung, semua pengurus turut bekerja di lapangan dan mereka memperoleh bagi hasil dari pendapatan pada hari tersebut.

“Saya dan pengurus yang bertugas, setiap hari mendapat upah yang berasal dari 20% dari tiket parkir pada hari itu. Terus, sebeluan sekali atau sesuai kesepakatan, 20% dari seluruh pendapatan akan diberikan kepada pengurus sebagai gaji setiap minggu. Tapi itu selain dana dari kedungwali/makam kiai manduk dan kotak infak mushala, karena dananya untuk pembangunan masjid...” (Rohadi, kom. pri. 2012)

Penerima manfaat langsung dari CBNRM di Desa Keseneng adalah masyarakat desa yang membuka warung di lokasi wisata, pemilik homestay, pemilik lahan yang dimanfaatkan sebagai *camping ground*, dan pemilik lahan yang tanahnya masuk dalam zonasi wisata. Beberapa penerima manfaat langsung dari pendapatan wisata dan CBNRM ditunjukkan pada Gambar 11.

Distribusi keuntungan dari CBNRM Desa Keseneng tidak hanya diterima oleh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan, namun diperoleh juga oleh seluruh warga desa secara tidak langsung. Bagi hasil pendapatan CBNRM yang diterima oleh seluruh warga adalah bagi hasil untuk pembangunan masjid desa, kas desa dan kas dusun yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, serta dana sosial yang diberikan pada warga yang mengalami musibah seperti sakit atau meninggal dunia. Persentase bagi hasil pendapatan PSABM Desa Keseneng seperti pada Tabel 9.

Dari Tabel 9 tersebut terlihat bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam dinikmati oleh masyarakat desa secara lebih adil. Masing-masing, baik pengurus, pekerja, dan seluruh warga desa menerima bagiannya sesuai dengan porsi dan perannya dalam pelaksanaan CBNRM. Kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan Keller et al. (2000) bahwa pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah ke pengelolaan berbasis masyarakat membantu kaum yang terpinggirkan dan terlupakan meningkatkan peran mereka dan memperoleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam.

Aspek keadilan dalam CBNRM di Desa Keseneng tidak hanya pada manfaat ekonomi, namun juga mencakup wewenang dan tanggung jawab masyarakat. Wewenang untuk mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya alam yang berada di kawasan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat melalui organisasi pengelola. Masyarakat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pengelolaan, bukan hanya menjadi penonton sebagaimana bila sumber daya alam dikelola oleh pemerintah daerah atau investor. Meskipun demikian, Desa Keseneng tetap membuka kesempatan bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi pada kegiatan yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata melalui skema bagi hasil.

Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Desa Keseneng membuat masyarakat menjadi lebih berdaya baik secara politik maupun ekonomi. Pergeseran strategi pengelolaan sumber daya alam yang bersifat *top down* dimana pemerintah daerah memegang peranan penuh menjadi pengelolaan berbasis masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal. Dengan demikian, masyarakat lokal pada tingkat desa

mempunyai wewenang yang sah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Pemerintah daerah dalam hal ini Disporabudpar Kabupaten Semarang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada masyarakat desa (Conger & Kanungo, 1988) untuk mengelola sumber daya alam. Pemda mengambil peran sebagai fasilitator yang mendorong dan mendampingi masyarakat berpartisipasi penuh dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, pemda tidak memiliki cukup sumber daya manusia untuk mengawal proses-proses CBNRM di Desa Keseneng.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemda menggandeng LSM Komunitas Salunding untuk mendampingi dan mengawal proses. Dengan dampingan Komunitas Salunding, masyarakat desa diajak untuk menata kembali pengelolaan sumber daya alam melalui perencanaan desa. Masyarakat menggali potensi yang dimiliki dan menyusun kembali rencana dan strategi pengelolaan sumber daya alam.

“Saya selaku pamong budaya di Kecamatan Sumowono ingin masyarakat tidak bergantung kepada Pemkab. Karena itu saya mengajak rekan-rekan Salunding yang menguasai berbagai metode dan sudah memiliki pengalaman untuk mendampingi Desa Keseneng. Tujuannya, meningkatkan kemandirian desa dan kemampuan manajemen dalam mengelola wisata alam di desa...” (Tri Subekso, kom. pri. 2012)

Masyarakat Desa Keseneng menjadi lebih berdaya, dalam artian memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam serta wewenang untuk mengambil keputusan. Kondisi tersebut selaras dengan pernyataan Budiati (2012) yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah, termasuk dalam perspektif politik sebagai kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.

CBNRM memberikan akses untuk mencari nafkah dari pengelolaan sumber daya bagi sebagian warga, terutama pekerja harian dan pedagang. Mereka umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang berpenghasilan kecil. Mereka menjadi lebih berdaya secara ekonomi sehingga memberikan efek domino positif untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan lebih berdaya secara politik.

Tabel 9. Bagi hasil CBNRM Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

PersentasePenerima (%)		Keterangan
35	Pengembangan wisata	Dimanfaatkan sesuai keperluan
20	Upah pekerja	Dibayarkan setiap minggu
10	Kas desa	Dimanfaatkan sesuai keperluan
8	Masjid	Setiap bulan, ditambah pendapatan kotak infak mushola dan makam Kyai Mandung
8	Dana sosial	Dimanfaatkan sesuai keperluan
5	Kesenian	Dimanfaatkan sesuai keperluan
5	Zonasi	Dibayarkan setahun sekali
5	Kesehatan/asuransi	Sesuai keperluan
3	Kas dusun	Dibayarkan setahun sekali
1	Keamanan/Muspika	Sesuai keperluan



Gambar 8. Perencanaan desa



Gambar 10. Kerja bakti mempersiapkan lokasi wisata



Gambar 11. Pedagang menerima manfaat langsung pengelolaan sumber daya alam



Gambar 12. Hasil pelatihan kerajinan bambu

Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya alam diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, karena itu berbagai pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan. Beberapa pelatihan yang sudah dilakukan adalah pelatihan manajemen organisasi, *guiding*, pembuatan kerajinan bambu, pembuatan gula semut, dan pengemasan gula aren. Berbagai pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan dan keberdayaan warga dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Salah satu upaya pemberdayaan dengan meningkatkan nilai guna sumber daya alam seperti pada Gambar 12.

Resolusi konflik (*Conflict resolution*)

Pengelolaan sumber daya alam dengan fokus wisata di Desa Keseneng tak lepas dari konflik, namun dapat dikelola dengan baik melalui skema CBNRM yang dijalankan. Bahkan konflik yang muncul mengancam keberlangsungan pengelolaan tersebut. Karena itu, resolusi konflik merupakan bagian erat yang tak terpisahkan dari pengelolaan Desa Wisata Keseneng. Ada beberapa konflik yang muncul dalam perjalanan Desa Wisata Keseneng. Konflik-konflik tersebut muncul baik dengan pihak luar desa maupun konflik internal desa.

Konflik eksternal yang muncul adalah perebutan pengelolaan Curug Paleburgongso dengan Desa Gondang, kecemburuan desa-desa tetangga karena dilewati wisatawan yang akan mengunjungi Curug Tujuh Bidadari, dan ketidakkonsistenan dukungan pemerintah di atasnya yang mengancam keberlangsungan Desa Wisata Keseneng.

Sementara itu, konflik internal berupa penolakan para pemilik lahan di kawasan wisata dan sekitarnya untuk menjaga kelestarian, ketidakpercayaan warga terhadap pengelolaan hasil wisata, serta kecemburuan warga yang tidak mendapat manfaat langsung dari desa wisata. Konflik itu sudah mencapai tahap ketidakpercayaan warga terhadap pengurus dan wacana penutupan area wisata Curug Tujuh Bidadari.

Terkait berbagai permasalahan tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai bentuk tindakan dalam rangka resolusi konflik. Salah satunya adalah lobi untuk

menyelesaikan sengketa pengelolaan Curug Paleburgongso. Sengketa yang semula mengarah pada perusakan lingkungan oleh warga Dusun Keseseh Desa Keseneng untuk memboikot upaya pembukaan kawasan tersebut oleh Desa Gondang Kecamatan Limbangan, dapat diselesaikan dengan baik. Lobi ke Desa Gondang menghasilkan kesepakatan bersama pengelolaan kawasan lewat persaingan yang sehat.

Desa Gondang membenahi dan membangun fasilitas wisata dari arah wilayahnya. Sebaliknya, pihak Desa Keseneng akan mengembangkan berbagai sarana dan fasilitas untuk menarik wisatawan dari arah wilayahnya. Keberhasilan lobi tersebut berhasil meredam konflik dan kedua belah pihak sama-sama menjaga kondisi kawasan tersebut demi tujuan bersama, yakni usaha berbasis wisata alam.

Lobi juga dilakukan untuk memperkuat dukungan Pemerintah Kabupaten. Salah satu kebijakan kabupaten yang saat itu mengancam adalah tahap penyusunan Raperda RTRW akhir 2010, di mana Desa Keseneng termasuk wilayah yang diperbolehkan untuk penambangan batu. Kondisi ini tentu mengancam keberlangsungan pembangunan berkelanjutan berbasis wisata alam. Karena itu, Pemerintah Desa Keseneng melakukan lobi ke berbagai pihak untuk menghapuskan izin penambangan batu tersebut dari draf Raperda RTRW. Lobi untuk memperoleh dukungan tersebut membuahkan hasil. Hingga akhirnya dalam Perda RTRW Kabupaten yang disahkan pada tahun 2011, tidak terdapat lagi penambangan batu, bahkan Kecamatan Sumowono secara keseluruhan tertutup bagi penambangan.

“Dalam Perda RTRW, pengembangan wisata sumowono diarahkan menjadi wisata terbatas berbasis masyarakat. Pendirian hotel, losmen, dan tempat hiburan lain seperti karaoke tidak diperbolehkan. Penginapan yang boleh dibuka hanya home stay dan wisata desa. Tujuannya agar atraksi wisata benar-benar dapat menyejahterakan warga. Kami tidak ingin hal yang terjadi seperti di Bandung juga terjadi di Sumowono, yakni objek dikuasai orang luar yang bermodal besar, sementara warga hanya menjadi buruh di daerah sendiri...” (Tri Subekso, kom. pri. 2012)

Langkah resolusi konflik yang kedua adalah lewat penyaluran bagi hasil, baik untuk mengatasi permasalahan eksternal dengan desa-desa tetangga, terutama yang dilalui wisatawan saat menuju kawasan wisata maupun dengan warga desa.

Ketika banyak wisatawan datang ke Desa Keseneng, kecemburuan tidak bisa dihindari. Desa-desa tetangga yang dilewati mulai mengeluhkan arus lalu lintas wisatawan yang tidak memberikan kontribusi pada desa mereka. Karena itu, sering ada penutupan jalan karena kegiatan desa dan dilakukan pengalihan arus. Namun wisatawan yang lewat dijalur alternatif tersebut dipungut biaya. Hal ini tentu membuat wisatawan kurang nyaman.

Mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Desa Keseneng melakukan pendekatan dengan memberikan bagi hasil dari pendapatan wisata. Meskipun tidak besar nilainya, hal itu membawa perubahan yang signifikan. Ketika ada acara di desa tetangga dan terpaksa dilakukan penutupan jalur

utama, desa tetangga menyediakan jalur alternatif tanpa ada pungutan. Bahkan, desa tak segan memberikan tanda/petunjuk menuju Curug Tujuh Bidadari.

“Salah satu lobi yang kami lakukan terhadap desa tetangga, terutama yang jalurnya dilalui wisatawan yang akan ke Desa Keseneng adalah memberi kontribusi dana sosial yang disisihkan dari penghasilan wisata C7B. Dengan demikian, warga desa lain yang dilalui wisatawan justru mendukung pengembangan C7B...” (Maskuri, kom. pri. 2012)

Bagi hasil juga mengatasi konflik yang muncul internal desa, yakni antara pengelola wisata dengan pemilik lahan yang terkena zonasi wisata. Para pemilik lahan merasa dirugikan karena diwajibkan menjaga kelestarian lahan masing-masing agar tempat wisata tetap indah. Bahkan banyak di antara mereka yang akan memboikot aturan tersebut dengan cara mengubah kondisi lahan, misalnya menebangi pohon yang ada. Hal itu terjadi karena mereka belum mendapat manfaat dari penghasilan curug. Untuk meredakan konflik tersebut, pengelola dan pemerintahan desa mengalokasikan dana bagi hasil bagi para pemilik lahan. Dana tersebut diberikan setahun sekali. Setelah bagi hasil ini dijalankan, konflik mereda.

Bagi hasil juga diterapkan untuk meredakan konflik antardusun. Sebab, warga dua dusun, yakni Keseseh dan Telawah, merasa dianaktirikan. Menurut warga, manfaat kawasan wisata hanya untuk warga Dusun Keseneng. Hubungan antarwarga pun menjadi renggang. Hal ini menghambat program pengelolaan alam untuk atraksi wisata, mengingat lahan-lahan warga Telawah berada di perbukitan yang menyangga kawasan Curug Tujuh Bidadari. Ada juga lahan-lahan di sekitar kawasan yang menjadi milik warga Keseseh. Karena itu, bagi hasil juga dialokasikan untuk tingkat dusun, di mana dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dusun.

“Sekarang kami di Dusun Telawah tengah memperbaiki jalan utama dusun. Karena itu, kami diperbolehkan oleh Kepala Desa mengambil dana bagi hasil C7B sebelum akhir tahun. Sebab, dana tersebut mendesak untuk menambah dana alokasi desa yang tidak cukup untuk memperbaiki seluruh ruas jalan utama tersebut...” (Mbah Sabar, kom.pri. 2012)

Resolusi konflik yang tak kalah penting adalah transparansi pemerintahan desa dan pengelola objek wisata. Transparansi lewat administrasi yang baik dan pelaporan berkala tentang pendapatan dan penggunaan dana hasil wisata, memperkuat akuntabilitas, kredibilitas, dan dukungan warga terhadap pengelola wisata desa. Isu ketidakpercayaan dan wacana penutupan objek wisata oleh warga desa, menjadi pupus setelah transparansi pelaporan pengelolaan desa, dirasa sesuai dengan kenyataan yang warga temui sehari-hari. Warga juga sudah merasakan manfaat pengelolaan sumber daya alam secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya resolusi konflik lainnya menyentuh level individu per individu warga desa. Untuk meredakan ketidakpuasan dan tuduhan soal monopoli pengelolaan wisata oleh segelintir warga, masyarakat memperoleh kesempatan terlibat aktif mengelola dan memanfaatkan peluang yang timbul setelah wisatawan ramai berkunjung.

Caranya, pemerintah desa mendorong pengembangan usaha-usaha lain yang dikelola oleh warga di luar pengurus wisata. Usaha itu berupa pengelolaan warung yang diserahkan kepada unit tersendiri dengan keanggotaan yang bersifat terbuka. Artinya, warga yang berminat bisa membuka kios di objek wisata dengan modal sendiri. Pengelola dan pihak desa menyediakan lahan dan rancangan bentuk kios agar seragam. Kemudian, didorong pembukaan- pembukaan *homestay* di rumah-rumah warga Dusun Keseneng. Bahkan untuk menjangkau warga di dua dusun lain, didorong pengembangan usaha penunjang, seperti industri gula aren di Telawah dan kerajinan bambu di Keseseh. Pemerintah desa dengan dukungan pihak luar, membantu pendanaan dan pelatihan. Bahkan untuk Dusun Keseseh didorong mengembangkan objek wisata, yakni mulai merintis pembukaan Curug Paleburgongso dari jalur Desa Keseneng.

“Kami mulai melebarkan jalan menuju Curug Paleburgongso yang semula lebar setengah meter menjadi tiga meter. Kami juga tengah mempersiapkan berbagai fasilitas wisata dari arah Dusun Keseseh agar wisatawan yang akan berkunjung ke Paleburgongso mau melalui dusun kami. Saya dan beberapa warga juga sudah berlatih dan mulai bisa membuat kerajinan bambu untuk souvenir wisata. Harapannya, wisata di Keseseh juga dapat berkembang seperti di C7B dan banyak warga yang mendapat manfaat langsung. Warga bahkan banyak yang sudah berencana membuka warung untuk wisatawan.” (Amin Sobirin, kom. pri. 2012)

Dengan demikian, semakin banyak warga yang terlibat dan warga memperoleh kesempatan yang sama. Selain itu, pergantian personel atau kebutuhan tenaga tambahan di organisasi inti pengelola kawasan wisata Curug Tujuh Bidadari juga mulai diumumkan secara terbuka.

Berdasar uraian tersebut, CBNRM di Desa Keseneng memberikan kontribusi positif dalam resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana dijelaskan oleh Keller et al. (2000), penanganan perselisihan antara masyarakat lokal maupun kepentingan atas sumber daya alam yang lebih besar baik pada tingkat lokal, daerah, bahkan nasional merupakan salah satu aspek yang dapat dibidik melalui pengelolaan dengan pendekatan *community based*.

Pengetahuan dan kesadaran (*Knowledge and awareness*)

CBNRM membuka peluang-peluang ekonomi baru yang tidak merusak lingkungan, sebaliknya mendukung pelestarian lingkungan. Kearifan lokal yang sudah ada dipadukan dengan pengetahuan ekologi dan manajemen modern untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Masyarakat Desa Keseneng secara turun-temurun sudah mengelola sumber daya yang dimiliki secara arif, terutama pada tata guna lahan. Sebagian besar lahan berbukit-bukit dengan kelerengan tinggi merupakan hutan rakyat dengan berbagai tanaman keras dan tanaman lain seperti bambu dan aren. Sawah dan tegalan hanya pada lahan-lahan yang datar atau dengan kelerengan rendah seperti pada Gambar 13.



Gambar 13. Tata guna lahan Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Tata guna lahan semacam itu menjauhkan Desa Keseneng dari bahaya banjir dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Namun, pada sisi lain perekonomian tidak berkembang dan tingkat kemiskinan tinggi. Karena desakan perekonomian tersebut, masyarakat mulai membuka lahan dengan kelerengan tinggi untuk ditanami tanaman pertanian. Kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun tidak diterapkan lagi karena dikalahkan oleh kepentingan ekonomi.

Lahan-lahan dengan kelerengan tinggi berubah menjadi sawah tadah hujan atau tegalan. Meskipun demikian, konversi hutan rakyat untuk ditanami tanaman pangan tetap tidak mampu menyejahterakan masyarakat desa. Sebaliknya, Desa Keseneng justru menuai bencana. Erosi lahan meningkat dan beberapa kali terjadi banjir serta tanah longsor. Melalui CBNRM, mereka menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan tidak harus mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dengan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam yang dimiliki. Mereka memadukan kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun dengan pengetahuan modern yang diperoleh melalui interaksi dengan pihak lain maupun belajar dari praktek pengelolaan yang dijalankan. Masyarakat desa juga menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan desanya terkait erat dengan desa-desa tetangganya dalam satu ekosistem sehingga mereka juga berusaha membangun kerja sama untuk melestarikan lingkungan.

Perlindungan keanekaragaman hayati (*Biodiversity protection*)

Perlindungan keanekaragaman hayati menjadi salah satu capaian CBNRM di Desa Keseneng. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai tujuan wisata mendorong masyarakat untuk mengelola lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati beserta habitatnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penghentian tambang batu, pelarangan mengambil ikan dengan racun dan listrik, penghijauan, dan zonasi desa.

Desa Keseneng kaya akan batuan, baik batu sungai maupun batu gunung. Selain batu-batu yang berada pada

aliran sungai, di desa tersebut terdapat banyak bukit batu. Melihat potensi tersebut, masyarakat banyak yang menambang batu untuk keperluan pribadi maupun komersial. Bahkan beberapa orang sudah mengantongi izin tambang dari kepala daerah.

Sejak CBNRM dilaksanakan, mereka menyadari bahwa tambang batu dalam skala besar akan merusak lingkungan desa dan sungai. Hilangnya batuan dari sungai dan perbukitan akan mempertinggi laju erosi yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pengangkutan batu keluar desa juga membuat sarana jalan yang ada lebih cepat rusak. Selain itu, tambang batu juga berisiko mengancam keselamatan pekerjaannya. Karena itu, masyarakat desa menghentikan kegiatan tambang komersial, bahkan meminta bupati untuk mencabut izin yang sudah dikeluarkan. Penambangan hanya boleh dilakukan dalam skala kecil untuk keperluan pribadi atau pembangunan sarana-prasarana desa.

“Sekarang warga hanya menambang untuk keperluan sendiri seperti membangun rumah. Itu pun hanya boleh mengambil batu besar yang ada di permukaan tanah, tidak boleh melakukan penggalian.” (Rohadi, kom. pri. 2012)

Sungai-sungai yang mengalir di Keseneng selain penuh dengan batuan, juga menjadi habitat berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu sumber pemenuhan gizi masyarakat desa. Awalnya, masyarakat boleh mengambil ikan-ikan di sungai dengan cara apapun, baik memancing, menjala, meracun, maupun menyetrum. Umumnya pencari ikan memilih cara cepat dan praktis, yaitu dengan racun atau listrik. Akibatnya, ikan-ikan kecil yang belum layak konsumsi ikut mati sehingga populasi ikan di sungai semakin menurun.

CBNRM mendorong masyarakat untuk menghentikan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan tersebut. Pelarangan mengambil ikan dengan racun dan listrik diberlakukan di Desa Keseneng. Untuk memulihkan populasinya, benih-benih ikan ditebar di sungai. Masyarakat desa mengambil ikan hanya dengan memancing atau menjala sehingga kelestarian ikan-ikan tetap terjaga.

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya didorong dengan kesepakatan untuk melestarikan daerah kiri kanan sungai dan sekitar mata air. Kesepakatan tersebut tertuang dalam draf peraturan desa (perdes). Meskipun perdes tersebut belum ditetapkan, daerah kanan kiri sungai di sekitar Curug Tujuh Bidadari sudah menjadi daerah lindung. Pemilik lahan tidak diperkenankan mengalihfungsikan menjadi lahan pertanian. Sebagai kompensasinya, pajak tanah dibayar dari pendapatan wisata dan pemilik lahan memperoleh bagi hasil pada akhir tahun.

CBNRM terus dikembangkan pada sektor lain yang mendukung desa wisata dan konservasi lahan. Peningkatan nilai ekonomi gula aren dan kerajinan bambu mendorong masyarakat untuk tidak mengalihfungsikan hutan rakyat yang masih ada. Sebab, dengan menjaga dan memanfaatkan hutan rakyat, justru masyarakat mendapat hasil yang lebih besar. Beberapa tempat dengan kelerengan tinggi yang sudah telanjur dibuka untuk ditanami tanaman pangan mulai dihijaukan kembali melalui program

penghijauan dari pemerintah. Gambaran lahan yang dihijaukan dan kebun bibit ditunjukkan pada Gambar 14.

“Kini warga mulai sadar untuk menghijaukan kembali lahan-lahan yang gundul. Lewat kelompok tani dan mendapat dukungan pemerintah, saat ini desa menyiapkan 60.000 bibit tanaman jabon dan sengo laut untuk ditanam di seluruh desa..” (Mursalim, kom. pri. 2012)

CBNRM banyak mendapat kritik sebagai retorika belaka dan lebih banyak gagal dari pada sukses (Keller et al. 2000; Blaikie 2006; Isyaku 2011). Tujuan sosial ekonomi umumnya lebih diprioritaskan dan lebih mudah dicapai sehingga meminggirkan tujuan konservasi (Keller et al. 2000). Meskipun demikian, di beberapa tempat, CBNRM berhasil dilakukan dan mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan sosial, ekonomi, maupun konservasi (Keller et al. 2000 ; Blaikie 2006).

Pada kasus di Desa Keseneng, pencapaian CBNRM pada aspek sosial dan ekonomi mampu mendorong perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati beserta habitatnya.

Pemanfaatan berkelanjutan (*Sustainable utilization*)

Desa Keseneng belum melakukan kerjasama dengan desa-desa lain dalam kawasan DAS Bodri hulu, terutama desa-desa yang lebih tinggi dan menjadi hulu dari sungai-sungai yang mengalir melalui desa tersebut untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.

CBNRM dengan pendekatan desa wisata di Keseneng memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat desa. Selain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga berkontribusi terhadap pembangunan desa. Keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam tersebut terkait erat dengan perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity protection*).

Berbagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati dilakukan warga Keseneng untuk menjamin keberlanjutan manfaat ekonomi yang diperoleh. Meskipun demikian, karena sumber daya alam yang dikelola merupakan bagian kecil dari daerah aliran sungai dan bukan dibatasi oleh batas administrasi desa, perlindungan yang dilakukan seharusnya termasuk daerah-daerah di atasnya. Kondisi sungai dan air terjun yang merupakan unggulan desa wisata dipengaruhi oleh kondisi lingkungan daerah-daerah tersebut.

Untuk menjamin keberlanjutan manfaat ekonomi tersebut, kondisi lingkungan dan keanekaragaman hayati harus tetap dijaga. Kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan penghalang utama pembangunan ekonomi (Munasinghe, 1993). Tujuan ekonomi dan sosial hanya akan tercapai sesaat bila lingkungan rusak. Sebaliknya, lingkungan dan sumber daya alam yang lestari akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Model implementasi CBNRM dalam Konservasi DAS

CBNRM berkembang sejak tahun 1980-an dan sangat populer pada dekade berikutnya karena menjadi fokus hampir semua lembaga donor internasional. Meskipun demikian, CBNRM mendapat banyak kritikan dan sebagian besar dianggap gagal (Keller et al. 2000; Blaikie 2006). Pada umumnya, CBNRM tidak dapat memberikan manfaat

yang diharapkan bagi masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kelangsungan lingkungan agar dapat menjadi modal pembangunan berkelanjutan.



Gambar 14. Penghijauan dilakukan pada lahan dengan kelerengan tinggi yang telanjur dikonversi menjadi lahan tanaman pangan.

Kegagalan dipicu sisi kepentingan peningkatan kesejahteraan. Biasanya, usaha berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang berhasil, menumbuhkan keinginan para pelakunya untuk mendapat hasil lebih. Namun hal itu tanpa kesadaran bahwa daya dukung lingkungan terbatas.

Kedua, CBNRM gagal karena persiapan yang kurang matang, terutama perencanaan di level pengelola atau masyarakat yang melaksanakan program tersebut. Faktor ketiga, inisiatif program CBNRM tidak dari masyarakat, tetapi dari luar tanpa proses tranfer kesadaran di tingkat lokal. Akibatnya, tidak muncul inisiasi dan kesadaran dalam proses pengelolaan. Semua faktor tersebut menimbulkan berbagai penyimpangan, dengan muara pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya sehingga CBNRM akhirnya gagal.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Desa Keseneng mampu mengatasi ketiga faktor penyebab kegagalan tersebut. Persiapan yang matang pada tingkat masyarakat melalui *community building* mampu membangun masyarakat yang berdaya serta memiliki pengetahuan dan kesadaran ekologi. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, bahkan berupaya meningkatkan daya dukungnya.

Inisiatif program berasal dari masyarakat desa dan menjadi cita-cita bersama sehingga ada keinginan untuk mewujudkannya bersama-sama. Aktifitas-aktifitas pengelolaan dilakukan secara partisipatif dengan proses yang melibatkan seluruh komponen anggota, yaitu warga desa. Komitmen yang kuat untuk menjalankan CBNRM mendorong warga desa untuk aktif berperan serta baik dengan menyumbangkan tenaga, pemikiran, maupun pendanaan pada awal program.

Pihak luar berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator yang mendorong dan memfasilitasi aspek-aspek yang belum dimiliki masyarakat desa. Fasilitator membantu memandu proses-proses di desa, terutama pada tahap perencanaan sehingga dapat memadukan pengetahuan lokal dengan manajemen modern dalam pengelolaan sumber daya alam.

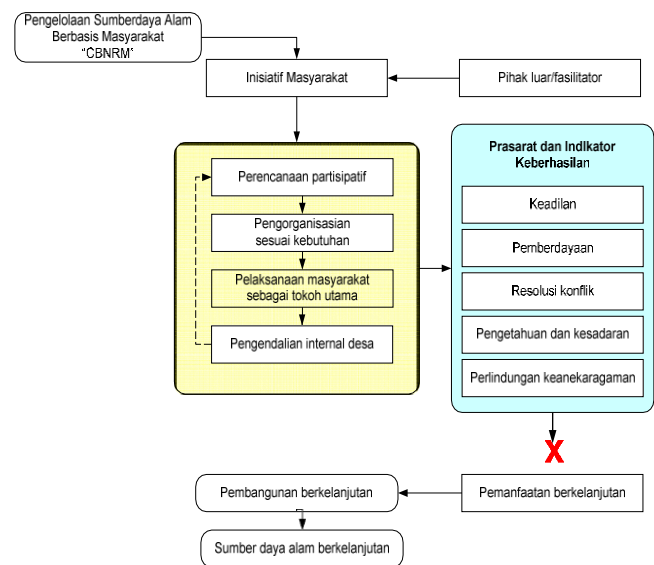
Penerapan CBNRM di Desa Keseneng merupakan program pengelolaan sumber daya alam yang berhasil memenuhi aspek-aspek manajemen yang baik, yaitu *planning, organizing, actuating dan controlling* (George, 1953 dalam Tripathi dan Reddy 2008). Antara satu aspek dengan aspek lainnya saling mendukung dan memengaruhi.

Dalam proses manajemen tersebut, pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng juga berhasil memberikan kontribusi positif pada aspek-aspek *community based* dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, yaitu *equity, empowerment, conflict resolution, knowledge and awareness, serta biodiversity protection* (Keller et al. 2000). CBNRM di Desa Keseneng mampu menyeimbangkan dua kepentingan yang sering dipertentangkan, yaitu masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (Blaikie 2006). Berdasarkan fungsi-fungsi atau aktifitas pengelolaan dan analisis aspek-aspek CBNRM, model konseptual CBNRM di Desa Keseneng tersebut ditunjukkan pada Gambar 15.

Kontribusi positif CBNRM di Desa Keseneng pada aspek lingkungan tidak hanya berpengaruh pada tingkat lokal desa, namun lebih jauh memberikan pengaruh positif pada konservasi DAS Bodri hulu dimana Desa Keseneng berada. Sebagaimana dijelaskan oleh Uphoff (1998), bahwa ekosistem lokal terhubung secara signifikan dengan ekosistem yang lebih besar. Karena itu, konservasi pada bagian sumber daya alam tertentu tidak hanya baik secara lokal, namun baik untuk semua komunitas yang terhubung dengannya.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan dengan CBNRM di Desa Keseneng sekaligus memenuhi tujuan pengelolaan DAS sebagaimana dijelaskan oleh Wulandari (2007), yaitu: (i) dengan dipertahankannya hutan rakyat di Desa Keseneng maka stabilitas tata air di wilayah tersebut dapat ditingkatkan (ii) selanjutnya stabilitas tanah turut meningkat karena tutupan hutan di atasnya sehingga proses degradasi lahan dapat dikendalikan; (iii) Pendapatan petani meningkat baik secara individu maupun komunal dengan adanya alternatif pendapatan dari CBNRM; (iv) perilaku masyarakat untuk melakukan konservasi yang mengendalikan aliran permukaan dan banjir meningkat.

Meskipun demikian, pengelolaan lingkungan di Desa Keseneng tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat menjamin pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable utilization*) bila hanya dilakukan sendiri tanpa didukung desa-desa tetangganya di kawasan DAS Bodri hulu, terutama desa-desa yang menjadi hulu sungai-sungai yang mengalir di Keseneng. Desa-desa tersebut antara lain yang termasuk Kabupaten Semarang Desa Pledokan, Piyanggang, Kemawi, Sumowono, Banyukuning, dan Desa Gondang Kabupaten Kendal.



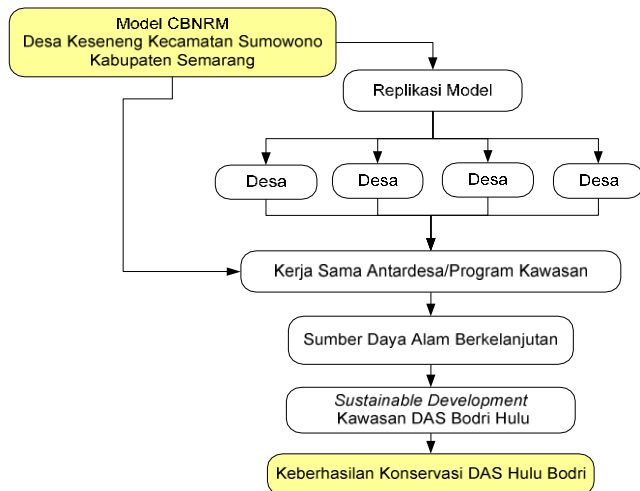
Gambar 15. Model konseptual CBNRM di Desa Keseneng

Pada kawasan DAS Bodri, bagian hulu sebagian besar berada di Kabupaten Temanggung, dan sebagian kecil berada di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Ekosistem desa-desa penyusun DAS Bodri hulu tersebut saling tergantung satu sama lain sehingga perubahan atau kerusakan lingkungan pada salah satu desa akan berpengaruh pada desa lainnya dan DAS Bodri secara keseluruhan.

Kondisi ekologis pada bagian hulu akan membawa eksternalitas bagi daerah yang berada di hilirnya. Karena itu program konservasi kawasan DAS Bodri memerlukan manajemen pada tingkat kawasan DAS. Sistem yang lebih besar tersusun atas sistem-sistem kecil. Sebaliknya, sistem-sistem kecil tergantung pada sistem yang lebih besar untuk bertahan. Jadi tingkat yang berbeda saling membutuhkan satu sama lain.

CBNRM dapat dipandang sebagai penghubung sistem mikro pengelolaan sumber daya alam pada tingkat desa dengan sistem makro tingkat kawasan daerah aliran sungai. Hutan, tanah, air, dan sumber daya biologi pada setiap desa merupakan lingkungan mikro yang menopang sistem yang lebih besar, yaitu lanskap dan daerah aliran sungai, bahkan pada tingkat regional, nasional, dan internasional (Uphoff, 1998).

Terpenuhinya tujuan pengelolaan sumber daya alam melalui CBNRM baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan merupakan jaminan terpenuhinya pembangunan berkelanjutan. Melalui CBNRM, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi-generasi mendatang. Model implementasi CBNRM dalam konservasi DAS yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 16.



Gambar 16. Model Implementasi CBNRM dalam mendukung konservasi DAS

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (i) Desa Keseneng sudah melakukan fungsi-fungsi/aktifitas pengelolaan sumber daya alam yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dengan baik. Masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara partisipatif dan mandiri. Adapun pihak luar yang turut berperan adalah Pemkab Semarang, LSM Komunitas Salunding dan media massa. Pemkab Semarang memberikan dukungan moral dan kebijakan, Komunitas salunding memfasilitasi perencanaan dan mendampingi proses-proses di desa, serta media massa membantu publikasi dan advokasi. (ii) CBNRM di Desa Keseneng mampu menyeimbangkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan konservasi sumber daya alam pada lima dari enam aspek CBNRM, yaitu keadilan (*equity*), pemberdayaan (*empowerment*), resolusi konflik (*conflict resolution*), pengetahuan dan kesadaran (*knowledge and awareness*), serta perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity protection*). Sedangkan pada aspek pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan (*sustainable utilization*) belum berhasil karena keberlanjutan sumber daya alam tidak dibatasi oleh batas-batas administratif melainkan batas ekologis DAS, serta dipengaruhi oleh faktor eksternalitas, terutama pengelolaan DAS hulu. (iii) Model konseptual CBNRM di Desa Keseneng sebagaimana digambarkan pada Gambar 15 merupakan penghubung sistem mikro pengelolaan sumber daya alam tingkat desa dengan sistem makro kawasan DAS. Untuk mendukung konservasi DAS diusulkan replikasi model tersebut pada

desa-desa di DAS hulu dan kerjasama antardesa dalam kawasan sebagaimana digambarkan pada Gambar 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Armitage D. 2005. Adaptive capacity and community-based natural resources management. *Environ Manag* 35 (3): 703-715.
- Blaikie P. 2006. Is Small Really Beautiful? Community Based Natural Resources Management in Malawi and Bostwana. *World Development* 34 (11): 1942-1957.
- BPDAS Pemali Jragung. 2010. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang, Semarang.
- Budiati L. 2012. Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Chambers R. 1992. Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. Institute of Development Studies.
- Conger JA, Kanungo RN. 1988. The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. *Acad Manag Rev* 13 (3): 471-482.
- Friedmann J. 1993. Toward a Non Euclidian Mode of Planning. *J Amer Plan Assoc* 59 (4): 482-485.
- Isyaku U, Chindo M, Ibrahim M. 2011. Assesing community-based natural resources management at Lake Naivasha, Kenya. *Environ Nat Resour Res* 1 (1): 106-116.
- Keller SR, Mehta JN, Ebbin SA, Lichtenfeld LL. 2000. Community Natural Resources Management: Promise, Rhetoric, and Reality. *Soc Natr Resour* 13: 705-715.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor; SK.328/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014.
- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Miles MB, Huberman AM. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Monografi Desa Keseneng. 2010. Monografi Desa Keseneng. Pemerintah Desa Keseneng, Semarang
- Munasinghe M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. The World Bank, Washington DC.
- Nugroho SP. 2003. Pergeseran kebijakan dan paradigma baru dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia. *Jurnal Teknologi Lingkungan* 4 (3): 136-142.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Sanders D. 1992. Soil Conservation Asia: An Interpretation Perspective. *Austr J Soil Water Conser* 5 (3): 45-60.
- Soemarwoto O. 1989. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta.
- Tripathi PC, Reddy PN. 2008. Principles of Management. 4 ed. Tata McGraw-Hill Publ Co Ltd, New Delhi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Uphoff N. 1998. Community Based Natural Resource Management: Conecting Micro and Macro Processes, and People with Their Environments', Plenary Presentation International CBNRM Workshop, Washington DC, 10-14 May 1998.
- Wulandari C. 2007. Penguatan Forum DAS sebagai Sarana Pengelolaan DAS secara Terpadu dan Multipihak. Prosiding Lokakarya Sistem Informasi Pengelolaan DAS: Inisiatif Pengembangan Infrastruktur Data. IPB dan CIFOR, Bogor.
- Zoebisch M, Cho KM, Hein S, Mowla R. (eds.) 2005. Integrated Watershed Management (Studi and Experiences from Asia). Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand.